

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2015
TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh
Ike Dwiyanti
E12113515**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2015
TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
PADA PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh
Ike Dwiyanti
E12113515**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2015
TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PADA PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
KABUPATEN MAMUJU UTARA

Yang disusun oleh

Ike Dwiyanti

E 12113515

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 15 Mei 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rasyid Thaha, M.Si
NIP.19570707 198403 1 003

Pembimbing II



A. Murfhi, S.Sos, M.Si
NIP.19720328 200012 1 001

Mengetahui:

**Ketua Departemen Ilmu Politik
Dan Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP.19641231 198903 1 027

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. Nurlinah, M.Si
NIP.19630912 198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2015
TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ike Dwiyanti

E 12113515

Telah Diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2017

Menyetujui

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Sekretaris	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Indar Arifin, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.Ip, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil alamin puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dzat pemilik alam semesta serta segala kehidupan dan kematian didalamnya. Pantaslah kita untuk senantiasa memuja dan memuji kebesaran serta keagungan-Nya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Ilahi ditiap aktivitas keseharian kita.

Allahumma Shalli Alasayyidina Muhammad Waala Alihi Wasahbihi Wasallim, shalawat dan salam teriring kehadiran Rasulullah SAW. Pemimpin terbaik yang menginspirasi peradaban manusia, sosok revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke kehidupan yang bernafaskan Islami dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga beliau, para sahabat dan pengikutnya senantiasa mendapat tempat istimewa disisi Allah SWT. Amin.

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ibu Hj. Fatma Watidan Ayah H. Syarifuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya selama penulis kuliah. Dan berkat kekuatan doa luar biasa yang tak henti hentinya beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan, di beri kekuatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Terimakasih telah berkorban sedemikian

banyak untuk penulis. Tak lupa didikan dan perjuangannya beliau dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas
5. Bapak Dr. Rasyid Thaha, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan memberi saran dan kritikan terhadap penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak A. Murfhi S,IP M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini serta

sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

7. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, dan Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si terima kasih atas masukan dan arahannya.
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
9. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh informan penulis di Kabupaten Mamuju Utara, yakni Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat Kecamatan Baras, Bapak Desa Balanti, Bapak Desa Motu, Bapak Desa Kasano, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat Setempat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
11. Staff PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara yang Telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan, terimakasih Ibu Emny, Ibu Hj Aty, Kak Halim, dan Kak Sinyo atas bantuannya

12. Kedua saudara penulis, Kakak Iqbal dan Adik Muhammad Iqmal semoga kita bisa jadi Anak yang berbakti dan dapat membahagiakan orang tua, Amin.
13. Kepada Alm. Nenek Hj. Nadira dan Kakek H. Tahere, Nenek Hj Mudiana, dan kakek Mangga' jasanya akan selalu terkenang dalam membantu membesarkan penulis.
14. Kepada saudara-saudara Ibunda tercinta, Om dan Bibi penulis yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, selalu bangga terhadap segala sesuatu yang penulis raih yaitu Om Burhanuddin, Bi aji Norma, Bi Aji Wati, Om Basri, Bi Aji Darmi, Om Baha, Om Iwan, Om Sakka, dan Om Rusli terimakasih atas pengorbanannya.
15. Kepada sepupu-sepupu penulis yang juga tidak hentinya memberi semangat dan dukungan kepada penulis dari kejauhan Kak Rahma, Kak Anthy, Kak Imran, Kak Nicken dan Kak Cece
16. Kepada Om Basri, Om yoga, Om Umar, Om Mardin, Om Yunus yg dinobatkan Panglima Perang perusahaan, terimakasih atas kekhawatirannya, pengorbannya dan motivasi yang diberikan kepada penulis, kak Uchy yang setia menemani dan mengantar penulis kemanapun pada saat penelitian.
17. Kepada teman – teman SMA Negeri 1 Kupang, yang selalu memberikan semangat dari kejauhan, Eko, Arfan, Priyo, Abi, mas Fahrur, Yusron, Irma, Rani, Anti, Anggie dan yang lainnya

18. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Sri Wulandari S yang paling setia, dan sangat memahami penulis dalam hal apapun dan teman tidur penulis, Siti Maryam Bahcri yang selalu menebar senyuman manis dalam melakukan apapun Bunda terbaik penulis, Dewi Puspita Sari yang selalu jadi pendengar yang baik dan pemberi nasehat terbaik dengan segala jenis kehebohannya, Febriyanty Fajri R, yang selalu ada saat dibutuhkan handal dalam persoalan uang dia bendahara terbaik penulis, Yusriah Amaliah paling cuek tapi diam diam sangat perhatian memiliki Tawa yang sangat khas. terimakasih untuk masaperkuliahannya yang indah semoga kita tetap dipertemukan pada masa selanjutnya Panggilan untuk sahabat-sahabat ini adalah *Ber-Enang*.
19. Kepada 5 pandawa penulis Yeyen, Wahyu, Wiwin, Uli dan Immank terimakasih untuk kesetiaanya melewati 6 Tahap Pengaderan bersama
20. Kepada special Friends penulis, Busmiati, Fitria Nadhifa, Ika Natsir, Juwiita Pratiwi terimakasih atas bantuan, dan selalu setia menghibur penulis
21. Kepada teman berbisnis I2M Project, Inda Ridayani Ari yang selalu mengerti situasi dan kondisi penulis
22. Saudara-saudara tak sekandung penulis, *Lebensraum*, terkhususnya ketua Angkatan Hasyim, dan yang lain herul, Alif, Azura, Dirga, Jusna, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Hanif, Dias, Zul, Yun, Irez, Erik,

Ekki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Babba, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Hasyim, Hillary, Mustika, Ina, Irma, Jay, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, dan Almh. IisTaffana Fadliah yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga. Kenangan bersama kalian akan selalu tersimpan rapi dalam hati. See You On Top

23. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.

24. Keluarga besar Karate-Do Gojukai Komisariat Sul-Sel Unit FISIP Unhas, terimakasih atas kebersamaan dan ilmu yang diberikan, terkhususnya teman – teman DIKSAR 1.

25. Kepada teman – teman Panitia MIMBAR 2016 , kepanitiaan terakhir penulis di masa perkuliahan, kakak steering Committe (kak Naje, Kak Pri, Kak Dondo, Kak Anci) angkatan 13 (Yeyen, Wahyu, Wira, Hary) dan terkhusus anggota divisi dana dan Usaha (Siska, Ram, Ughy, Citra, Nurul dan Yusuf Yasin).

26. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka, khususnya teman posko Induk teman

serumah selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu KakKoordcam Burhan, Sekcam Ismail, Kak Reza, Kak Ikram, Kak Azis, Ainun, Amel dan Dewi, My team KKN CHSI , KKN All In One Baraka, teman – teman HPMM Baraka dan Pak Lurah Surya beserta seluruh masyarakat Kelurahan Baraka.

27. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Mei 2017

Penulis

Ike Dwiyanti

DAFTAR ISI

Sampul	I
Lembar Pengesahan	li
Lembar Penerimaan	lii
Kata Pengantar	lv
Daftar Isi	Xii
Daftar Tabel	Xvi
Daftar Gambar	Xvii
Daftar Lampiran	Xviii
Abstark	Xix
Abstract	Xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Pustaka	9

2.1.1. Tinjauan tentang Implementasi	9
2.1.2. Tinjauan tentang Peraturan Daerah	12
2.1.3. Tinjauan tentang implementasi kebijakan	16
2.1.4. Tinjauan tentang CSR	21
2.2. Kerangka Pikir Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Lokasi Penelitian	40
3.2. Jenis penelitian	41
3.3. Informan Penelitian	43
3.4. Sumber Data	44
3.5. Definisi Konsep	45
3.6. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum	47
4.1.1. Kondisi Geografis Wilayah	47
4.1.2. Kondisi Demografis	52
4.1.3. Pemerintahan Umum	54
4.1.4. Sosial Budaya	56
4.1.5. Pertanian	60
4.2. Profil PT Unggul Widya Teknologi Lestari	60
4.2.1. Sejarah Singkat	60

4.2.2. Operasional Perusahaan	62
4.2.3. Letak Geografis	63
4.2.4. Struktur Organisasi	65
4.2.5. Visi misi	67
4.3. Pembahasan	68
4.3.1. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara	67
4.3.2. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	95
4.3.3. Sumber Daya	96
4.3.4. Karakteristik Agen Pelaksana	99
4.3.5. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksana	100
4.3.6. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana	104
4.3.7. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik	105
4.4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan CSR Pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara	107
4.4.1. Faktor pendukung	107
4.4.2. Faktor Penghambat	109
BAB V PENUTUP	113
5.1. Kesimpulan	113

5.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR	34
Tabel 2.	Kepentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan Program CSR	35
Tabel 3.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara.	50
Tabel 4.	Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara	51
Tabel 5.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara, 2010, 2014, dan 2015	53
Tabel 6.	Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Mamuju Utara, 2015	57
Tabel 7.	Produksi tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Utara (Ton), 2015	59
Tabel 8.	Program CSR Beserta Rekapitulasi Anggaran tahun 2011- 2016	71
Tabel 9.	Realisasi Program CSR pada Tahun 2016	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema Kerangka Pikir Penelitian	39
Gambar 2.	Peta Wilayah Kabupaten Mamuju Utara	48
Gambar 3.	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Mamuju Utara (km ²), 2015	49
Gambar 4	Peta Geografis PT. Unggul Widya Teknologi Lestari	64
Gambar 5	Struktur organisasi PT Unggul Widya Teknologi Lestari	66
Gambar 6	Revitibilisasi Posyandu	78
Gambar 7	Kegiatan sunat massal	79
Gambar 8	Bantuan Buku Sekolah	81
Gambar 9	Proyek perubahan taman belajar	82
Gambar 10	Renovasi Tempat Ibadah	83
Gambar 11	Perbaikan kualitas jalan	84
Gambar 12	Penanaman Tanaman Konservasi	85
Gambar 13	Penanaman Bambu di Sempadan Sungai	86
Gambar 14	Sekolah 3R	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015

Lampiran 3. Dokumentasi Program CSR

Lampiran 4. Dokumentasi penelitian

ABSTRAK

Ike Dwiyanti, Nomor Induk Mahasiswa **E12113515**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara*, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara, dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Undang – Undang yang mengatur, dan Sumber daya manusia yang tersedia. Dan yang menjadi faktor penghambat yaitu hubungan pemerintah dan perusahaan yang kurang baik, pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang kurang, dan upaya pemerintah dalam menangani persoalan CSR.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan Daerah Corporate Social Responsibility (CSR)*

ABSTRACT

Ike Dwiyanti, Number The Students **E12113515**, Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Preparing a thesis with the title *Implementation of Regional No 5 year 2015 Social Responsibility (CSR) Regulation on PT Unggul Widya Teknologi Lestari in North Mamuju region*, under the guidance of Mr. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si as First Advisor and Mr. A. Murfhi, S.Sos, M.Si as Supervisor II.

This study aims to find out the Implementation of Regional Social Responsibility (CSR) Regulations on PT Unggul Widya Teknologi Lestari Lestari in North Mamuju region, and the factors that influence it. To achieve these objectives, used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique.

Based on the results of research, in the implementation there are various factors that influence the supporting factors and inhibiting factors. Factors supporting the existence of the Law that regulates, and Human resources are available. And the inhibiting factors are poor government and corporate relationships, public understanding of corporate social responsibility or lack of CSR, and government efforts in dealing with CSR issues.

Keywords: *Implementation of Regional Social Responsibility (CSR)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penelitian

Beberapa negara di dunia terutama negara maju, peran pemerintah terlihat melalui regulasinya mampu memberikan pengaruh kepada entitas bisnis agar memiliki tanggung jawab sosial. Di Indonesia, sejak ditetapkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut menandakan bahwa perlunya transparansi dalam pelaksanaan dan pencapaian program *CSR*.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara semakin kompleks. Anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah yang tersedot ke beberapa persoalan – persoalan pemerintahan, menyebabkan pemerintah tidak akan mampu mengatasinya sendirian. Karena itu kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen khususnya dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial sangat diperlukan.

Pemerintah sendiri dalam melaksanakan program-programnya terkendala dengan berbagai hal diantaranya adalah terbatasnya kemampuan pendanaan. Disuatu lain, perusahaan melalui program *CSR*-nya dapat membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun bantuan pendanaan dari program

CSR tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemerintah. Bantuan pendanaan dari program CSR hanya merupakan pendukung bagi program pemerintah.

Tanggung jawab sosial kemudian dikenal konsep *community development* atau pengembangan masyarakat. Konsep *community development* banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (dikutip dalam Suharto, 1997:98) mendefinisikan pengembangan masyarakat merupakan suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Kebijakan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial yang mengharuskan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya dalam UU PT. (Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Kemudian UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan

bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan" .

Salah satu inti dari tanggung jawab sosial adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan oleh semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat madani (*civil society*), dan juga kalangan bisnis (perusahaan). Dalam hal ini CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung,2008:1).

Konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional. Pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak dapat menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari

perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Secara implementatif, perkembangan *CSR* di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep *CSR* dalam kegiatan perusahaannya. belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas *CSR* menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah.

Kabupaten Mamuju Utara sebagian besar merupakan daerah perkebunan, khususnya kelapa sawit. Saat ini ada sekitar enam perusahaan besar yang mengelola perkebunan dan juga pengelola minyak goreng. Salah satu diantaranya adalah perusahaan swasta PT. Unggul Widya Teknologi Lestari yang berada di Kecamatan Baras Desa Motu. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten Mamuju Utara, maka secara otomatis perusahaan tersebut dalam hal ini PT. Unggul Widya Teknologi Lestari diwajibkan mematuhi peraturan daerah tersebut.

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan

sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari melalui pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya, pelaksanaan program *CSR* masih kurang optimal, pemahaman masyarakat tentang adanya Program tanggung Jawab Sosial perusahaan atau bantuan perusahaan terhadap masyarakat sekitar pun masih sangat minim hampir sebagian masyarakat yang telah diwawancarai mengatakan tidak mengetahui akan bantuan tersebut. pola hubungan kemitraan antara pihak perusahaan dan pemerintah dalam penerapan program *CSR* pun tidak berjalan dengan baik

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang kegiatan operasionalnya secara langsung membawa dampak bagi lingkungan khususnya masyarakat sekitar kawasan perusahaan. Sehingga perlu

adanya perhatian khusus pihak perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas Peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi atau pelaksanaan *CSR*. Dimana, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan: kedua ini bermaksud mencari bentuk/hal yang disepakati dulu. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan ataupun penerapan atas sesuatu yang telah disepakati terlebih dahulu. Sehingga implementasi akan bermuara pada aktivitas atau mekanisme suatu sistem.

Kata mekanisme, dapat dilihat bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan panduan dari norma – norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Sehingga, peneliti mengambil judul penelitian mengenai : **"Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, Peraturan Daerah tentang *CSR* merupakan pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program *CSR* bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan,

kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah CSR yang dapat dilihat dari program – program CSR yang dilaksanakan tidak optimal, pemahaman masyarakat yang kurang terkait CSR , dan pola hubungan antara pemerintah yang kurang baik. titik tolak pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Implementasi mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. Unggul Widya Lestari Teknologi Di Kabupaten Mamuju Utara. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program CSR pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara?
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program CSR PT. Unggul Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaa program - program CSR PT. Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program CSR PT. Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang di harapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam penerapan kebijakan CSR yang telah diterapkan di Daerah Mamuju Utara.
3. Segi metodologis, hasil dari penelitian ini di harapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikompariskan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji Implementasi kebijakan CSR diberbagai perusahaan yang ada di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada.

2.1.1 Tinjauan Tentang Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Pengertian Implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara sebagai berikut:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Berdasarkan pengertian diatas bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok atau instansi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan tertentu. Implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden.

Implementasi dalam kajian suatu kebijakan publik dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur yang melalui saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, dalam artian bahwa implementasi menyangkut beberapa hal seperti menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh hasil dari suatu kebijakan tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho(2012;185) implementasi adalah Melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan ke dalam Undang-Undang, tetapi juga dapat berbentuk keputusan eksekutif atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan yang dapat mengidentifikasi masalah sehingga dapat menetapkan tujuan, cara yang digunakan dan struktur proses pelaksanaan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti(2012:64) menyatakan bahwa : Realitasnya, di dalam implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu,

tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola pengaturan : membentuk organisasi, menetapkan prosedur dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Indahono(2009:143) menyatakan bahwa :Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari kebijakan. Karena akan menentukan apakah kebijakan berjalan dan berhasil untuk menghasilkan output dan *outcomes* seperti apa yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Sedangkan, *outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

Christopher Hood dalam Parsons(2011:167) menyebutkan lima syarat untuk implementasi yang sempurna, yaitu :

1. Bahwa implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang jelas.
2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan diantara organisasi.
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu.

2.1.2. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah secara eksplisit dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan daerah atau yang disingkat dengan Perda adalah produk hukum dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang - undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku dalam wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang - undangan, yang secara garis besar mengatur tentang.

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang hak pembentukannya diberikan kepada daerah sebagai hak atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada penyelenggaran pemerintahan daerah sebagai pengakuan dan konsekuensi atas asas otonomi. Sehingga fungsi peraturan daerah lebih pada pengaturan hal – hal dalam menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah dapat juga dianggap sebagai aturan pelaksana dari Undang – Undang Dasar

Selain itu, Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegated legislation), yaitu (1) Undang – Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Peraturan Presiden.

Dalam panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah yang disusun oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dikemukakan bahwa peraturan daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi:

1. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Serta menampung kondisi khusus daerah; dan
3. Penjabaran lebih lanjut undang-undang yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus daerah merupakan materi muatan peraturan daerah yang membutuhkan inisiatif sendiri dari pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tersebut tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya delegasi kewenangan atau perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Van wijk/Konijnenbelt seperti yang dikutip Maria Farida Indrati S. bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan

atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

2.1.3 Teori-Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implemetornya dengan rinci.
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan, mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

a. Karakteristik dari masalah, meliputi:

1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah social secara teknis mudah dipecahkan, di pihak lain terdapat masalah-masalah social yang relative sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program implementasi.

2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relative sulit diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relative berbeda.

- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relative mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Karakteristik kebijakan/Undang-Undang, meliputi:
- 1) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkannya dalam tindakan nyata.
 - 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan social tertentu perlu ada modifikasi.
 - 3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

c. Variabel lingkungan, meliputi:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi akan membantu proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan

dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang sifatnya disinentif, seperti kenaikan BBM, atau kenaikan pajak akan kurang mendapatkan dukungan public.

- 3) Sikap dari kelompok misalnya mau melakukan intervensi terhadap, memberi komentar, kritik ataupun pertanyaan yang ditujukan kepada badan legislative.
- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).
- c. Perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana.
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi.

2.1.4 Tinjauan tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu perusahaan; *Social* memiliki arti kehidupan dalam masyarakat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat; sedangkan, *Responsibility* memiliki arti yaitu Tanggung Jawab. Pengertian *CorporateSocialResponsibility* dalam kenyataannya tidak dapat diartikan per kata karena *CorporateSocialResponsibility* merupakan satu bagian yang memiliki istilah sendiri. Menurut Dr. Hendrik Budi Untung,

“ *CorporateSocialResponsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan” (Hendrik Budi, 2008:1).

Pendapat lain dikemukakan oleh Riza Primahendra dalam Seminar *CorporateSocialResponsibility* yang berjudul *TheSecretofCSR : ConceptandApplicationInBussiness*, yang menyatakan

“*Corporate Social Responsibility's Definition is Responsibility of an organization for the impacts of its decision and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norm of behaviour; and is integrated throughout the organization*” (Riza Primahendra, 2008:6).

Menurut Riza Primahendra, *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu dampak atau akibat dari kegiatan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan

kegiatan yang terbuka, memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika dan bertujuan selain untuk menjaga keberlanjutan atau Sustainable perusahaan, bertujuan juga untuk mengembangkan masyarakat menjadi suatu masyarakat yang sejahtera.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* juga tertuang didalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 74 yang menyatakan,

“ (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

“ (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

“(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada

umumnya. Di dalam penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tujuan *corporate social responsibility* yaitu untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan tujuan yang dapat diperoleh dari penjelasan umum Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, nampak bahwa tujuan *corporate social responsibility* juga memiliki keterkaitan dengan tujuan negara yang di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007: 99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas.

Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management),

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut,
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya,
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi perusahaan juga memiliki banyak manfaat lainnya, antara lain :

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- 2) Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasi usaha.
- 5) Membuka peluang pasar lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Di dalam penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tujuan *corporate social responsibility* yaitu untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan tujuan yang dapat diperoleh dari penjelasan umum Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, nampak bahwa tujuan *corporate social responsibility* juga memiliki keterkaitan dengan tujuan negara yang di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Program *Corporate Social Responsibility* yang ideal Berdasarkan pembahasan mengenai seluk-beluk *corporate socialresponsibility*, maka dapat diketahui bahwa program *corporate socialresponsibility* yang ideal yaitu :

- Holistik, yaitu program *corporate social responsibility* denganmelibatkan stakeholders dalam perencanaan, implementasi danevaluasi.
- Komprehesif, yaitu dengan cara memperhatikan dampakprogram terhadap kondisi bidang kehidupan lainnya.
- Pendampingan, yang bertujuan untuk menjamin *sustainability*(keberlanjutan) dari program. Keterbatasan personilmenyebabkan pendampingan tidak optimal.

- Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*), yaitudengan memberdayakan potensi yang terdapat dalam dirimasyarakat melalui program-program yang dibuat.
- Adanya Nilai Edukasi (pembelajaran) dan Nilai Kearifan lokalyang membawa dampak positif, yaitu penerapan *corporate social responsibility* melalui program-program yang dibuat olehperusahaan harus memiliki nilai pembelajaran atau pelatihandalam rangka mengembangkan potensi dalam masyarakat danharus mendasarkan pada nilai-nilai dalam masyarakat setempatyang diakui kebenarannya seperti nilai keseimbangan (harmoni),kebersamaan yang dapat membawa dampak positif di dalammasyarakat

bentuk kegiatan tanggungjawab sosial menurut Kotler dan Lee (2005) yaitu bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, dan pelatihan kerja bidang tertentu, yang diberikan dapat berupa dana (modal), pinjaman, biaya promosi, tenaga (bimbingan teknis tenaga ahli), peralatan/teknologi, akses informasi, dan sebagainya. Menurut Wibisono (2007 dalam Wicaksosno, 2010), contoh lingkup program CSR yang disarikan dari beberapa perusahaan terkemuka adalah:

- a) Bidang sosial, seperti pendidikan/pelatihan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepemudaan, keagamaan, dan penguatan kelembagaan.

- b) Bidang ekonomi, seperti kewirausahaan, pembinaan UKM, agribisnis, pembukaan lapangan kerja, sarana/prasarana ekonomi, dan usaha produktif lainnya.
- c) Bidang lingkungan, seperti penggunaan energi secara efisien, proses produksi yang ramah lingkungan, pengendalian polusi, penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengembangan ekowisata, perumahan dan pemukiman.

International Organization of Standardization (ISO) 26000:2010 sebagai Panduan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* *International Organization of Standardization (ISO)* merupakan Badan Penetapan Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil Badan Standarisasi nasional setiap Negara, yang didirikan pada 23 Februari 1947. Dalam melaksanakan kegiatannya sebagai badan penetapan standar Internasional, ISO memiliki tujuan antara lain :

1. Memberikan kontribusi positif dimana kita tinggal. Melalui ISO 26000:2010, memberikan sarana untuk melakukan perdagangan, pengetahuan, peluang untuk kesempatan berinovasi dalam teknologi serta pengetahuan mengenai manajemen yang baik dan pelaksanaannya;
2. Memberikan solusi dan keuntungan pada semua sektor, termasuk agrikultur, konstruksi, pengiriman, transport, teknologi komunikasi dan pelaksanaannya; dan

3. Memberikan standar pengembangan bagi kebutuhan pasar yang jelas, dan disediakan untuk dikembangkan oleh para ahli dalam suatu bisnis. Sehingga ketika bisnis telah berjalan, maka standar akan diberlakukan. Standar yang ditetapkan oleh Badan Penetapan Standar yaitu ISO 26000:2010 sebagai *Guidance on Social Responsibility* merupakan solusi dan bagian dari keuntungan bagi sektor yang menerapkan standar dalam kegiatan usahanya. ISO 26000:2010 memberikan keuntungan atau *benefit* bagi pelaksanaannya, antara lain :

- Memberikan keuntungan secara kompetitif;
- Memberikan reputasi atau nama baik bagi kegiatan usaha;
- Memberikan kemampuan untuk mempertahankan pekerja yang bekerja di Perusahaan atau unit usaha;
- Pemeliharaan produktivitas usaha, termasuk di dalamnya moral dan komitmen kerja para karyawan; dan
- Menjaga hubungan baik dengan *Shareholders* atau Pemegang Saham dan *Stakeholders* atau Pemangku Kepentingan Perusahaan;

ISO 26000:2010 memberikan keuntungan kepada kegiatan usaha dalam rangka memberikan standar dalam pemeliharaan hubungan baik dengan pemegang saham maupun dengan pemangku kepentingan. ISO 26000:2010 memberikan pedoman untuk semua jenis organisasi,

terlepas dari bentuk, ukuran besar atau kecil kegiatan usaha maupun lokasi. Hal yang tertuang pada pedoman tersebut antara lain :

- Konsep, definisi dan istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;
- Latar belakang, tren dan karakteristik tanggung jawab sosial;
- Prinsip dan praktek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;
- Subjek utama dari tanggung jawab sosial; Mengintegrasikan, melaksanakan dan mempromosikan perilaku sosial yang bertanggung jawab di seluruh organisasi melalui kebijakan dan praktek;

Selain manfaat yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satu perusahaan pun yang menjalankan CSR tanpa memiliki motivasi. Karena bagaimanapun tujuan perusahaan melaksanakan CSR terkait erat dengan motivasi yang dimiliki. Wibisono (2007:78) menyatakan bahwa sulit untuk menentukan benefit perusahaan yang menerapkan CSR, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat kepastian benefit-nya. Oleh karena itu terdapat beberapa motif dilaksanakannya CSR, diantaranya:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-financial utama bagi perusahaan dan bagi stakeholdes-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
2. Layak mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga harus

mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.

4. Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* atau daur ulang kedalam siklus produksi.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak reward ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut

membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dengan beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi (2003:4) setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Tabel di bawah ini menggambarkan motif tersebut.

Tabel 1.

Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR

Motif Keamanan	Motif memenuhi kewajiban kontraktual	Komitmen Moral
<p>Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi</p> <p>Program tidak dilakukan setelah kontrak ditandatangani.</p> <p>Kecenderungannya program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar pasca desentralisasi</p>	<p>Pertanggungjawaban program CSR kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.</p> <p>Propaganda kegiatan CSR melalui media massa.</p>	<p>Wacana CSR</p> <p>Propaganda kegiatan CSR melakukan media massa</p>

Sumber : Mulyadi (2003:4)

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif,

idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Ide mengenai konsep CSR juga dilandasi pemikiran demikian (UN Global Compact:20). Secara filantropis perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi dimana masyarakat berada. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata. Mulyadi dalam tulisan yang berjudul *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan, dan Keberlanjutannya* (2003:5). Membagi stakeholders berdasarkan kepentingannya.

Tabel 2.

Keentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan Program CSR

Perusahaan	Pemerintah Daerah	Masyarakat
Keamanan fasilitas produksi Kewajiban kontrak	Mendukung pembangunan daerah	Penerima program yang diberdayakan

Sumber : Mulyadi (2003:5)

Dalam konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan,

perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya.

Pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap CSR, dan cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR atau hanya sekedar membuat pencitraan di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR menurut Wibisono (2007:73), diantaranya:

Pertama, Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*). Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi (*reputation driven*), yaitu motivasi

pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.

Kedua, Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (*market driven*). Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada salah satu perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Mamuju Utara kecamatan Baras Desa Motu.

CSR merupakan bentuk tanggung Jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan , dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2015 bahwa CSR ini dilaksanakan

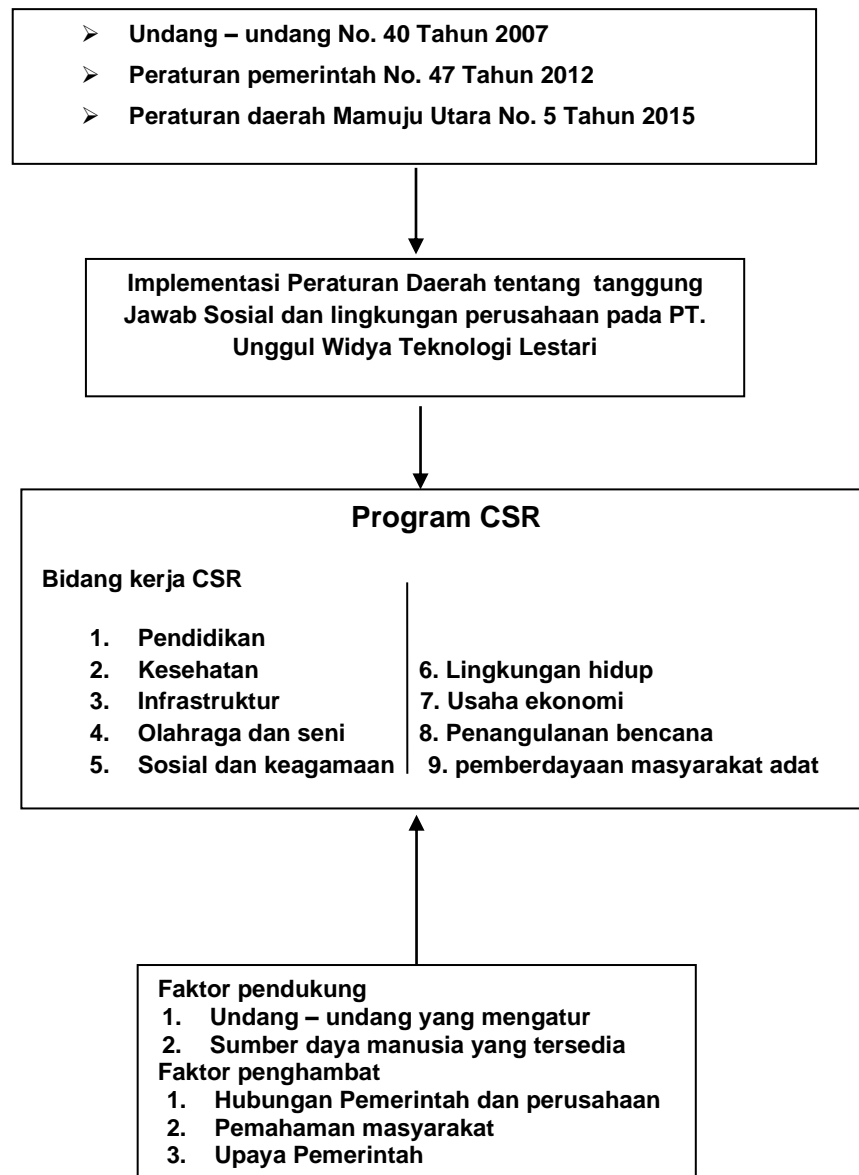
guna pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut pasal 11 menyatakan bidang kerja CSR yang dilakukan oleh perusahaan ada 10 bidang kerja, akan tetapi terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi implementasi CSR di Kabupaten Mamuju Utara meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni hubungan pemerintah dan perusahaan yang kurang baik, pemahaman masyarakat yang masih kurang, upaya pemerintah dalam menangani persoalan CSR, dan berbagai permasalahan – permasalahan yang ditemukan di lapangan sedangkan faktor pendukung adalah adanya undang – undang yang mengatur serta sumber daya manusia yang tersedia,

Berikut adalah skema kerangka pemikiran penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Mamuju Utara:

Skema Kerangka Berpikir

Gambar 1



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian dan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dimana desain penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah CSR pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Di Kabupaten Mamuju Utara. Penulis bermaksud memperoleh gambaran (deskripsi) yang mendalam berdasarkan data-data dan fakta yang ditemui langsung di lapangan.

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Mamuju Utara Kecamatan Baras dengan objek penelitian dan siapa yang akan menjadi narasumber ialah orang yang dianggap berkompeten dan memahami akan permasalahan yang penulis angkat dan kemudian menjabarkan segala permasalahan yang terjadi.

Waktu yang diperkirakan oleh penulis ialah selambat-lambatnya Dua bulan agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang penulis akan teliti.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif yakni penulis akan menggambarkan dan menganalisis segala yang berkaitan dengan Peraturan Daerah CSR pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta-fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan Teknik Pengumpulan Data.

Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, Misalnya :

1. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah dengan cara mewawancarai langsung informan yang paham dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara

yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir apabila peneliti sudah merasa data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan mengetahui secara langsung dan mendalam.

3. Dokumen dan Arsip

Pada penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang

berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian di pilih secara *purposive* baik dari aparaturnya pemerintah maupun masyarakat yang di anggap *representative* dan dapat memberikan informasi yang valid yang berhubungan dengan penelitian. Adapun informan yaitu :

1. Kepala Daerah (Bupati/WakilBupati) Kabupaten Mamuju Utara
2. Tim pengawas CSR
3. Kepala Camat Kecamatan Baras
4. Kepala Desa Motu
5. Kepala Desa Balanti
6. Masyarakat desa Motu
7. Masyarakat desa Balanti
8. *Development Sustainability (ISPO)* PT. Unggul Widya Teknologi Lestari
9. Tenaga Kerja PT Unggul Widya Teknologi Lestari
10. Masyarakat penerima CSR

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang penulis gunakan.

1. Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.2 Definisi Konsep

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Implementasi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebut CSR adalah kumpulan program dan kegiatan sosial serta pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan bidang kerja yang telah ditetapkan . tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat

terutama komunitas sekitar perusahaan (*people*), serta lingkungan (*planet*).

3.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Proses analisa data dilakukan melalui tahapan, yakni identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi.

Sekalipun dalam penelitian ini memperoleh kuantitatif, seperti dikemukakan Meleong, semata-mata dimaksudkan untuk mengukur kontinuitas masalah, mempermudah dan mempertajam analisis empiris. Analisis data penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat satu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

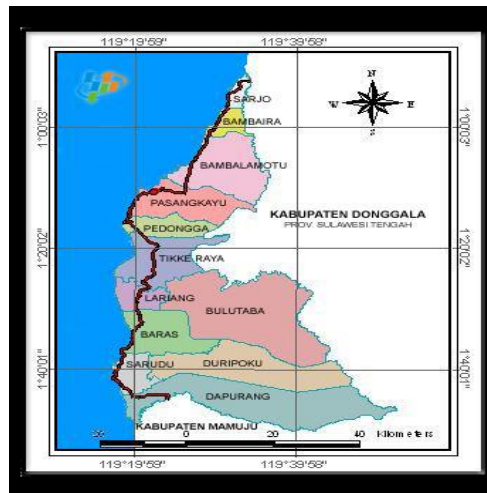
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian beserta hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Kabupaten Mamuju Utara yang meliputi kondisi geografis, aspek-aspek pendukung seperti potensi sumber daya alam dan hayati, aspek sosial dan ekonomi Selain itu, bab ini menguraikan pelaksanaan Peraturan Daerah CSR pada salah satu perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mamuju Utara serta faktor-faktor yang berpengaruh baik itu sifatnya menghambat maupun mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah CSR ini.

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Kondisi Geografis Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Mamuju Utara terletak pada 00 40' 10" – 13 50' 12" Lintang Selatan dan 1190 25' 26" – 1190 50' 20" Bujur Timur dari Jakarta (00 0' 0" , Jakarta = 1600 48' 28" Bujur Timur dari *Green Wich*).

Gambar 2.
Peta Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

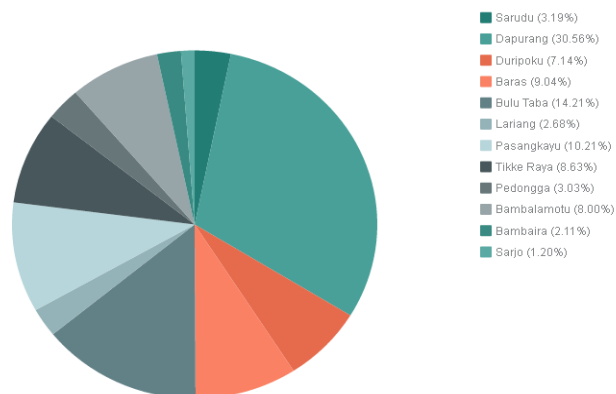


Sumber : BPS, Kabupaten Mamuju utara dalam angka 2016

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mamuju Utara memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; Selatan – Kabupaten Mamuju Tengah; Barat – Selat Makassar; Timur – Kabupaten Donggala. Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari 12 kecamatan, yaitu:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Kecamatan Sarudu. | -Kecamatan Pasangkayu. |
| - Kecamatan Dapurang. | - Kecamatan Tikke Raya. |
| - Kecamatan Duripoku. | - Kecamatan Pedongga. |
| - Kecamatan Baras. | - Kecamatan Bambalamotu. |
| - Kecamatan Bulu Taba. | - Kecamatan Sambaira. |
| - Kecamatan Lariang | - Kecamatan Sarjo |

Gambar 3
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Mamuju Utara
(km²), 2015



Sumber : BPS, Kabupaten Mamuju utara dalam angka 2016

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan, dengan luas masing-masing kecamatan, yaitu: Sarudu (97,05 km²), Dapurang (930,06 km²), Duripoku (217,25 km²), Baras (275,12 km²), Bulu Taba (432,65 km²), Lariang (81,65 km²), Pasangkayu (310,91 km²), Tikke Raya (262,61 km²), Pedongga (92,09 km²), Bambalamotu (243,65 km²), Bambaira (64,22 km²), dan Sarjo (36,49 km²).

Wilayah Kabupaten Mamuju Utara bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Tabel 3.***Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara (km2),***

Kecamatan	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Sarudu	5	-
Dapurang	5	-
Duripoku	4	-
Baras	5	1
Bulu Taba	7	-
Lariang	7	-
Pasangkayu	4	2
Tikke Raya	5	-
Pedongga	4	-
Bambalamotu	5	1
Bambaira	4	-
Sarjo	4	-
Mamuju Utara	59	4

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2016

Data pada table di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu desa Bulu Taba dengan jumlah 7 desa, lalu desa Lariang dengan jumlah 7 desa namun dari kedua desa tersebut tidak memiliki kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit yaitu terdapat 4 kecamatan dengan jumlah 4 desa dan tidak memiliki kelurahan yaitu kecamatan Duipoku, kecamatan pedongga, kecamatan bambaira, dan kecamatan sarjo Sehingga jumlah desa dan kelurahan di daerah seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju Utaradesa sebanyak 59 desa dengan 4 kelurahan salah satu dari tujuh kecamatan tersebut yang ada di Mamuju Utara yang ditempati oleh perusahaan terkait PT Unggul Widya Teknologi Lestari yaitu Kecamatan Barasdengan jumlah 5 desa dan 1 kelurahan.

Tabel 4
Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju
Utara

Kecamatan	Km ²	Persentase
(1)	(2)	(3)
Sarudu	97,05	3,19
Dapurang	930,06	30,56
Duripoku	217,25	7,14
Baras	275,12	9,04
Bulu Taba	432,65	14,21
Lariang	81,65	2,68
Pasang kayu	310,91	10,21
Tikke Raya	262,61	8,63
Pedongga	92,09	3,03
Bambalamotu	243,65	8,00
Bambaira	64,22	2,11
Sarjo	346,49	1,20
Mamuju Utara	3 043,75	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2016

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Dapurang yang memiliki luas daerah terluas yaitu : 930,06 Km² dengan persentase 30,56, sedangkan luas daerah terkecil dengan luas daerahnya adalah Bambaira yaitu 64,22 Km² dengan persentase 2,11. Sehingga luas daerah seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju Utara yaitu 3,043,75 dengan persentase 100,00 salah satu dari tujuh kecamatan tersebut yang ada di Mamuju Utara yang ditempati oleh perusahaan terkait PT Unggul Widya Teknologi Lestari yaitu Kecamatan Baras dimana luas daerahnya yaitu 275,12 dengan persentase 9,04

4.1.2 Keadaan Demografis

Penduduk Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 156.464 jiwa yang terdiri atas 81.389 jiwa penduduk laki-laki dan 75.075 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Mamuju Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2,60 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,70 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,48 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108,41.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015 mencapai 51 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sarjo dengan kepadatan sebesar 218 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Dapurang sebesar 15 jiwa/ km².

Tabel 5.

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara, 2010, 2014, dan 2015**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			Laju pertumbuhan penduduk per Tahun	
		2010	2014	2015	2010 - 2015	2014- 2015
1	Sarudu	12 168	13 823	14 198	16,68	2,71
2	Dapurang	11.530	13 323	13 744	19,20	3,16
3	Duripoku	4 875	5 395	5 476	12,23	1,50
4	Baras	15 356	17 869	18 430	20,02	3,14
5	Bulu Taba	9 396	10 321	10 430	11,00	1,06
6	Lariang	5 993	6 654	6 700	11,80	0,69
7	Pasangkayu	22 886	26 991	28 021	22,44	3,82
8	Tikke Raya	13 805	15 493	15 841	14,75	2,25
9	Pedongga	6 563	7 549	7 549	15,02	2,58
10	Bambalamotu	16 292	18 329	18 329	15,20	2,15
11	Bambaira	8 622	9 589	9 774	13,36	1,93
12	Sarjo	6 883	7 744	7 972	15,82	2,94
Mamuju Utara		134 369	152 505	156 464	16,44	2,60

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2016

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan Pasangkayu merupakan yang terbanyak jumlah penduduknya yaitu ± 28.021 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,82. sedangkan yang terkecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Duripoku yaitu hanya sekitar ± 5 476 Jiwa, dengan laju pertumbuhan yaitu 1,50.

4.1.3 Keadaan Pemerintahan Umum

Kabupaten Mamuju Utara sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Mamuju. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Mamuju Utara dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Sejak berdirinya, Kabupaten Mamuju Utara telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 4 (empat) Kecamatan. Pada tahun 2007, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2007, dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Susunan pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara periode 2014–2019 terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari 11 badan, 15 dinas dan 1 Inspektorat. Selain itu, di bawah pemerintah daerah juga terdapat 12 kantor kecamatan, 4 kantor kelurahan, 2 kantor penghubung di tingkat provinsi dan pusat, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Layanan Pengadaan, Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah-sekolah dan 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Kesehatan yang berkedudukan di kecamatan. Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 30 orang, dengan 28 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi SMA.

Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari enam fraksi, yaitu fraksi PDI-Perjuangan, Karya Pembangunan, Partai Demokrat, Amanat Reformasi, Gerakan Indonesia raya, dan Hanura. Fraksi PDI-Perjuangan memiliki anggota sebanyak 7 orang, dengan 6 orang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi Karya Pembangunan beranggotakan 8 orang yang seluruhnya laki-laki. Fraksi Partai Demokrat beranggotakan 5 orang yang seluruhnya laki-laki. Fraksi Amanat Reformasi beranggotakan 4 orang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Hanura masing-masing beranggotakan 3 orang yang seluruhnya laki-laki.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Mamuju Utara dibentuk 3 komisi dan satu Koordinator/Pimpinan DPRD Mamuju Utara yang masing-masing beranggotakan 9 orang dan 3 orang untuk Koordinator/Pimpinan DPRD Mamuju Utara. Lembaga wakil rakyat ini sepanjang tahun 2015 sudah mampu menghasilkan produk hukum sebanyak 7 jenis produk hukum yang terdiri dari 5 Keputusan DPRD dan 2 Peraturan Daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2015 berjumlah 3.952 orang terdiri dari 1.962 laki-laki dan 1.990 perempuan. Sebagian besar PNS tersebut berpendidikan sarjana/S1. Sebagian besar PNS adalah golongan III.

4.1.3 Sosial Budaya

Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam mengukur sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang berkualitas dapat mendorong pembangunan suatu daerah. Tingkat partisipasi pendidikan haruslah didukung oleh penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidikan. Kabupaten Mamuju Utara mempunyai 134 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan rasio murid-guru sebesar 14.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek, seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2015, jumlah sarana dan prasarana kesehatan kabupaten Mamuju Utara adalah 1 rumah sakit, 15 puskesmas, 15 unit puskesmas keliling, 40 puskesmas pembantu, 32 poskesdes, 14 polindes, dan 266 posyandu. Keberadaan sarana kesehatan tersebut juga didukung oleh sejumlah tenaga kesehatan, yaitu 17 orang dokter, 144 bidan dan 104 perawat. Keluarga Berencana Salah satu strategi yang ditempuh dalam upaya menanggulangi pesatnya perkembangan jumlah penduduk adalah melalui program keluarga berencana. Keberhasilan dari program ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam menyukseskan program. Berdasarkan data Dinas PP dan KB Kabupaten Mamuju Utara, pasangan usia subur di Mamuju Utara pada tahun 2015 berjumlah 27.251 pasangan dengan 20.125 merupakan

akseptor aktif. Jenis Kontrasepsi yang digunakan antara lain, Pil, IUD, Suntikan, Kondom, MOP/MOW, dan Implan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 6
Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Mamuju Utara, 2015

Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah
		I	II	III	III+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sarudu	165	407	1 790	852	56	3 270
Dapurang	279	432	1 012	827	204	2 754
Duripoku	76	665	272	189	28	1 230
Baras	227	416	1 769	1 355	558	4 325
Bulu Taba	78	93	1 686	706	129	2 692
Lariang	549	374	393	84	8	1 408
Pasangkayu	120	596	1 999	1 466	237	4 418
Tikke Raya	310	531	1909	859	118	3 727
Pedongga	439	316	759	146	47	1 707
Bambalamotu	469	969	1 893	679	85	4 095
Bambaira	487	413	466	385	118	1 869
Sarjo	173	592	694	222	1	1 682
Mamuju Utara	3 372	5 804	14 642	7 770	1 589	33 177

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2016

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan Pasangkayu merupakan yang terbanyak jumlah Keluarga sejahtera yaitu 4.418 Jiwa. sedangkan yang terkecil jumlah Keluarga Sejahteranya adalah kecamatan Duripoku yaitu hanya sekitar 1,230 Jiwa.

4.1.4 Pertanian

Tanaman PanganSub sektor tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Pada tahun 2015 jumlah total luas lahan sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Mamuju Utara adalah 2.545 hektar sawah irigasi dan 1.677 sawah non irigasi.

HortikulturaSub sektor hortikultura di Kabupaten Mamuju Utara , terdiri dari tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan,. Produksi tanaman sayur-sayuran yang paling dominan di Mamuju Utara pada tahun 2015 adalah cabai dengan produksinya sebesar 159,90 ton.

Tanaman PerkebunanLuas area tanaman perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2015 terdiri dari kelapa sawit seluas 41.167,74 hektar dari perkebunan rakyat . Di samping Kelapa Sawit, luas area perkebunanyang mempunyai kontribusi yang paling besar adalah Kakao/Coklat seluas 12.801,00 hektar dari perkebunan rakyat, serta Kelapa Dalam dengan seluas 4.954,50 hektar.

Tabel 7
Produksi tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis
Tanaman di Kabupaten Mamuju Utara (Ton), 2015

Kecamatan	Kelapa	Kelapa Sawit	Kakao	Kopi	Lada	Cengkeh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sarudu	66,72	58 310,00	219,43	-	-	1,30
Dapurang	23,63	62 856,50	721,11	-	-	-
Duripoku	8,26	131 274,75	540,64	-	-	-
Baras	56,45	93 434,20	171,94	0,60	-	-
Bulu Taba	32,01	123 597,75	596,70	-	-	-
Lariang	86,58	44 192,25	75,20	0,07	-	-
Pasangkayu	288,33	249 200,00	629,69	0,27	-	6,21
Tikke Raya	302,95	64 143,25	77,45	-	-	-
Pedongga	274,65	40 094,25	95,63	-	-	0,95
Bambalamotu	1 995,71	20 696,55	1 327,78	0,29	-	56,15
Bambaira	1 820,14	5 001,25	737,46	0,18	-	24,67
Sarjo	623,11	1 997,50	729,47	-	-	25,32
Mamuju Utara	5 578,53	694 798,25	5 922,47	1,41	0,00	114,60

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2016

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kelapa sawit adalah produksi Tanaman perkebunan terbanyak di kabupaten Mamuju Utara dengan Jumlah 694 798,25 , sedangkan produksi tanaman paling sedikit yaitu Lada dengan Jumlah 0,00.

4.2 Profil PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Mamuju Utara

4.2.1 Sejarah Singkat PT Unggul Widya Teknologi Lestari

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berkantor pusat di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Tjiungwanara Njoman yang merupakan salah satu investor swasta nasional. Pada awal berdirinya, perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit. Seiring dengan perkembangan usahanya, PT. Unggul Widya Teknologi Lestari mulai menjajaki usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Hal ini terlihat dari perencanaan perusahaan untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi) dan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit pada tahun 1985.

Berdasarkan surat KepMen RI/No/351/KPTS/KB510/6/1987, tertanggal 15 Juni 1987, PT. Unggul Widya Teknologi Lestari mendapat izin untuk pengelolaan lahan di daerah Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Mamuju Utara, Sulawesi Barat) dengan pencadangan areal seluas 17.000 ha dengan rancangan penanaman kelapa sawit 10.000 ha. Masyarakat plasma merupakan peserta transmigrasi dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sampai

saat ini telah berdiri 10 Satuan Pemukiman (SP), dimana setiap SP berpenduduk sekitar 300 kepala keluarga.

Perintisan perkebunan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari ditandai dengan penanaman kelapa sawit yang pertama pada tanggal 09 Juli 1989 oleh Menteri Perkebunan dan Tanaman Keras Ir. Hasrul Harahap yang didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan H. Zainal Basri Palaguna, Bapak Tjiungwanara Njoman dan H. Aziz Ihsam, menjadi sebuah tonggak awal keseriusan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari untuk mengembangkan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit. Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) pertama ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 27 November 1990 dengan kapasitas olah PMKS sebesar 60 ton/jam. PMKS tersebut, beroperasi pertama kali pada tanggal 12 Juli 1992.

Pada bulan juni tahun 1990 di bangun pelabuhan khusus untuk pengapalan CPO dan kernel dengan nama Pelabuhan Bone Manjing, yang terletak di Desa Doda Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan pembangunan pelabuhan tersebut, dapat mempermudah proses pendistribusian hasil produksi CPO dan kernel.

Pada bulan taun 1994 dilakukan pengiriman dan pengapalan CPO dan kernel untuk yang pertama kalinya oleh PT Unggul Widya Teknologi

Lestari tergabung dalam satu group Widya Coorporation yang terdiri dari beberapa perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yaitu perusahaan PT. Manakara Unggul Lestari, PT Unggul Sawitra Makmur, PT Daria Dharma Pratama, dan PT Mulia Inti Perkasa. Selain itu, perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit, widya corporation juga memiliki perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pabrik minyak kelapa sawit yaitu PT saranamukti Dirgasentosa dan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi yaitu PT Citra Widya Education dan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.

4.2.2 Operasional Perusahaan

Operasional kerja PT. Unggul Widya Teknologi Lestari meliputi:

a. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Unggul Widya Teknologi Lestari terdiri dari kebun inti dan kebun plasma. Kebun inti dengan luas areal 13.794,32 ha terbagi menjadi dua kebun yakni kebun Baras I dengan luas areal 4.563,690 ha dan kebun Baras II dengan luas 3.089,630 ha. Untuk kebun plasma yang dikelola oleh PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dengan luas areal 6.140 ha. Perusahaan ini juga mempunyai areal khusus pembibitan kelapa sawit dengan luas 1 ha. Secara umum, tanaman kelapa sawit PT. Unggul

Widya Teknologi Lestari merupakan Tanaman Menghasilkan (TM).

b. Pengolahan Kelapa Sawit

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, juga melakukan operasional pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO dan kernel. Pengolahan TBS tersebut dilakukan di dua PMKS, yaitu PMKS Baras dengan kapasitas 60 ton/jam dan PMKS Agri Baras yang berkapasitas 45 ton/jam extention 90 ton/jam. Untuk saat ini, PMKS Baras hanya menerima TBS dari kebun plasma dan kemitraan. Sedangkan untuk PMKS Agri Baras khusus mengolah TBS dari kebun inti.

4.2.3 Letak Geografis dan Administratif

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari terletak pada koordinat antara 118046'15,9" BT-11906'9,06" BT serta 02051'30,71" LS-03034'15,69" LS. Adapun letak geografis PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4 Peta Geografis PT. Unggul Widya Teknologi Lestari

Sedangkan secara administratif, PT. Unggul Widya Teknologi Lestari terletak di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Jarak lokasi perusahaan dari Makassar ± 700 km, dan jarak dari Palu ± 200 km. Areal perkebunan kelapa sawit di Baras berada pada ketinggian 0-60 mdpl (meter diatas permukaan laut). Perkebunan kelapa sawit PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berbatasan wilayah dengan :

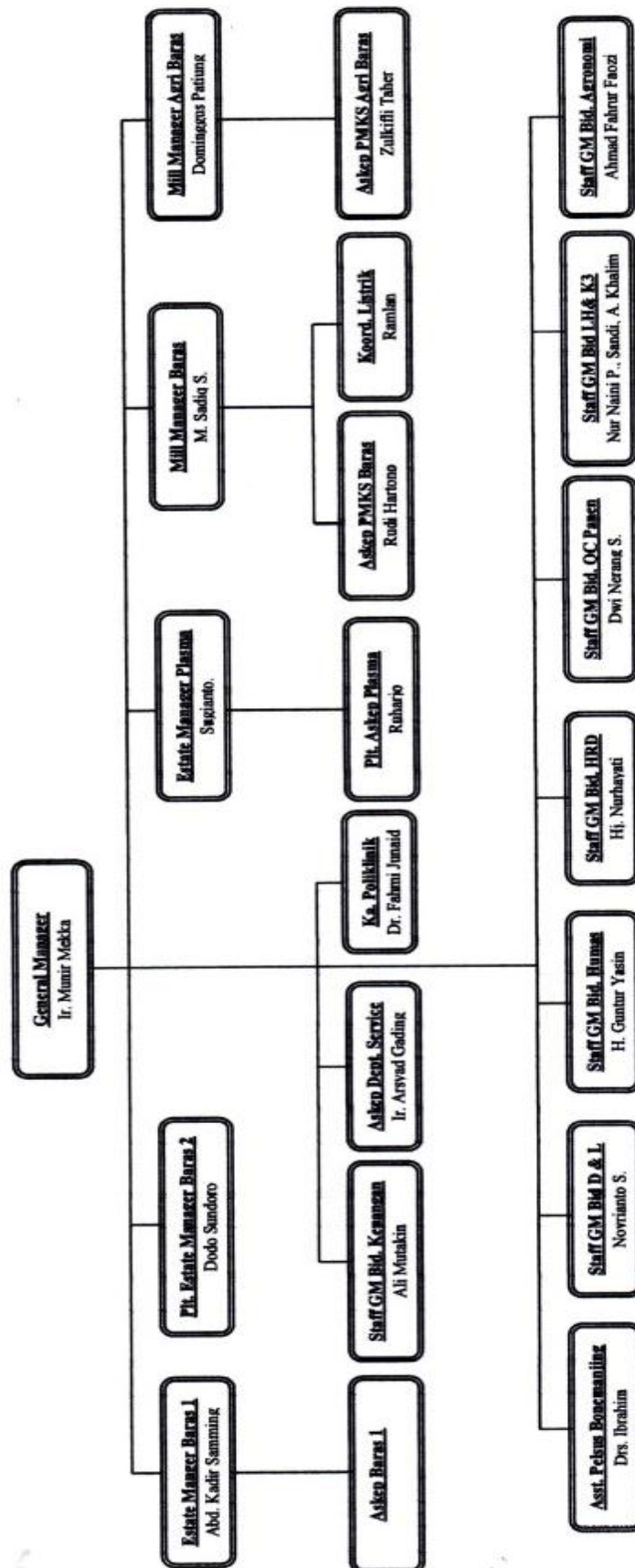
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lariang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu-Mamuju
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kuma.

4.2.4 Struktur Organisasi

Guna menunjang kinerja sebuah rangkaian produksi maka diperlukan sebuah badan struktur organisasi yang mengatur jalannya proses produksi yang di setiap elemen dari struktur organisasi tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Dengan adanya suatu organisasi maka tugas dan fungsi masing – masing jabatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.



STRUKTUR ORGANISASI PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)- BARAS, MAMUJU UTARA, SULAWESI BARAT



4.2.5 Visi Misi

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. PT Unggul Widya Teknologi Lestari sebagai salah satu Perusahaan terbesar diwilayah kabupaten Mamuju Utara. Untuk itu perusahaan telah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

“ Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang Unggul dan Lestari ”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi utama sebagai berikut:

1. Mengedepankan Tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional
2. Memperbarui kualitas dan keterampilan sumber daya manusia
3. Menghasilkan produk yang berkualitas unggul
4. Peduli terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Mamuju Utara Peraturan daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan dalam meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Mamuju Utara serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka perusahaan dalam hal ini PT Unggul Widya Teknologi lestari wajib melakukan tanggung jawab sosial Perusahaan. Melaksanakan tanggungjawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagii jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan ;keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah memahami makna yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini pengumpulan data untuk keperluan analisis dilakukan yakni melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap objek-objek yang menjadi sasaran CSR di daerah sekitar perusahaan. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat lokal di

daerah sekitar perusahaan yaitu pada Desa Motu, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, serta manajemen perusahaan yang terkait dengan CSR. Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke perusahaan dan masyarakat di daerah sekitar perusahaan. Pengumpulan data tersebut kurang lebih satu bulan lamanya, yakni mulai tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 03 Maret 2017.

Pelaksanaan penelitian dimulai sejak ditanggapinya surat penelitian yang telah dimasukkan pada tanggal 12 Januari 2017. Berawal dari ketika pertama kali peneliti diantarkan untuk bertemu dengan Staf Khusus yang menangani persoalan CSR yaitu Ibu Emny dan kemudian bertemu dengan Staff GM bidang HRD yaitu Hj. Nurhayati lalu bertemu dengan *General Manager* yaitu Ir. Munir Mekka . Hal pertama yang menjadi pembahasan ialah aturan dan tata tertib yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian. Selanjutnya, beliau menanyakan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan peneliti laksanakan. Kemudian peneliti memberikan gambaran singkat mengenai penelitiannya

Tanggung jawab sosial perusahaan berkembang setiap dekade Hal tersebut dinyatakan oleh Dahlsrud (2006) yang mencatat ada sebanyak 37 definisi CSR di dunia. Banyaknya diskusi tentang isu CSR juga sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dimana perusahaan tidak hanya memberikan perhatian kepada pemilik saham (*shareholder*) semata akan tetapi juga perhatian terhadap kepentingan stakeholder berdasarkan peraturan

yang berlaku dan bisnis yang berkelanjutan (OECD, 2004). Melihat entitas bisnis sebagai bagian isu sosial seperti dalam beberapa definisi CSR, menunjukkan adanya cara pandang yang lebih luas dari pada sekedar yang melihat perusahaan sebatas barang dan jasa bagi masyarakat. Adapun hasil wawancara bersama bagian CSR yaitu *Development Sustainability (ISPO)* ibu Nur Naini P. Menyatakan:

Definisi CSR menurut saya adalah CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan dimana CSR ini dilaksanakan bukan hanya semata – mata karena harus dilakukan dan telah di atur oleh UU tetapi karena perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan social dan lingkungan masyarakat yang berada disekitar perusahaan kami menerapkan beberapa program yang diharapkan mampu mengembangkan potensi sumber daya Manusia (SDM), perekonomian dan lingkungan sekitar perusahaan (wawancara, 06 Februari 2017)

Dalam hasil wawancara dengan Bagian CSR perusahaan *Development Sustainability (ISPO)* menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan memberikan bantuan yang sifatnya berkelanjutan maksud dari sifatnya berkelanjutan ini dijelaskan oleh salah satu staff GM bidang H & L Bapak Novrianto menyatakan:

Program CSR yang dimaksudkan sifatnya berkelanjutan adalah, dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya bantuan berupa uang, tetapi bantuannya seperti alat untuk menghasilkan Uang misalnya seorang nelayan, perusahaan bukan memberikan bantuannya berupa ikan tetapi Alat pancing untuk bekerja, dan dapat menunjang perekonomian masyarakat secara berkelanjutan (Wawancara, 22 Februari 2017)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa CSR yang dimaksud Pihak Perusahaan adalah yang sifatnya berkelanjutan dimana setiap kegiatan CSR yang dilakukan kepada masyarakat memiliki dampak yang bukan bersifat sementara namun memiliki dampak yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan program CSR adapun hasil wawancara bersama bagian CSR Khusus Perusahaan yaitu *Development Sustainability* ibu Nur Naini P. Menyatakan

“mengenai CSR, kami telah melakukan berbagai kegiatan CSR dan kegiatan tersebut terbagi beberapa bidang kerja, diantaranya yaitu bidang kerja kesehatan misalnya dilakukan bantuan pembangunan posyandu, bidang kerja pendidikan yaitu diberikannya bantuan buku kesekolah yaitu TK dan SD di desa Motu. (Wawancara, 06 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan CSR Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilihat dari ungkapan salah satu Staff perusahaan yang menangani khusus CSR yaitu Dept Sustainability (ISPO).

Adapun data sekunder yang diperoleh dari perusahaan terkait program CSR yang dilakukan oleh PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2011 – 2016 Dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini

TABEL 8.
PROGRAM CSR BESERTA REKAPITULASI ANGGARAN TAHUN 2011 – 2016

No	Nama Kegiatan	Tahun (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Kredit Pendidikan Politeknik CWE	150.083.333	120.500.000	255.916.667	83.000.000	
2	Honorarium Guru SD	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
3	Bantuan alat nelayan	20.000.000	20.000.000			
4	Pemberian bantuan ambulance		135.000.000			
5	Kegiatan pelatihan daur ulang sampah rumah tangga			40.000.000		
6	Pembangunan jembatan penghubung antar desa			357.978.104		
7	Pembuatan jalan penghubung antar desa			157.352.000		

8	Bantuan alat berat untuk perataab lahan TPU desa Bambiloka	5.000.0000			
9	Normalisasi Sungai Majene (6 Km)	216.500.000			
10	Normalisasi sungai biai (5 Km)	200.000.000			
11	Pembuatan flat Docker SDN Kapohu	13.958.000			
12	Pemberian bantuan ternak sapi	23.000.000			
13	Hubungan stakeholder	424.800.000	765.830.451	758.261.561	
13	Renovasi atap rumah masyarakat dusun kapohu	100.000.000			
14	Pembangunan 4 unit ruang kelas SD di Desa Motu	150.000.000			
15	Renovasi Tempat Ibadah		59.000.000		

16	Kegiatan cerdas cermat	20.405.500	
17	Bantuan acara pengukuhan adat desa Kulu	1.000.000	
18	Sunatan masal di kecamatan baras	24.062.000	24.000.000
19	Penanaman Mangrove	105.000.000	35.000.000
20	Renovasi tempat ibadah		12.000.000
21	Proyek perubahan taman belajar		10.000.000
22	Revitalisasi posyandu		20.783.000
23	Donasi kegiatan peringatan hari lingkungan hidup		5.000.000
JUMLAH		Rp. 203,083,333, Rp. 308,500,000- Rp. 1.302,704,771	Rp. 790,000,000- Rp. 1,008,297,951- Rp. 898,044,561-

Sumber : data PT. Unggul Widya Teknologi Lestari

Dari tabel diatas diperoleh gambaran mengenai program CSR yang dilakukan beserta rekapitulasi anggaran CSR selama tahun 2011 – 2016, dengan total anggaran pertahunnya, tahun 2011 total anggaran yang digunakan Rp.203,083,333,- tahun 2012 total anggaran Rp.308,500,000,- tahun 2013 dengan jumlah anggaran terbanyak yaitu Rp.1.302,704,771,- tahun 2014 total anggaran Rp.790,000,000, -tahun 2015 total anggaran Rp.1,008,297,951,- terakhir yaitu tahun 2016 total anggaran Rp.898,044,561- .Berdasarkan hasilwawancara langsung dari beberapa staff perusahaan dan data sekunder yang di dapatkan, bahwa memang benar perusahaan telah melakukan kegiatan CSR terbukti dari program CSR yang dilaksanakan setiap tahunnya.

masyarakat merupakan sasaran dari program CSR, pemahaman masyarakat tentang CSR atau Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah hal terpenting dalam mengoptimalkan implementasi. Namun istilah CSRhanya diketahui oleh tokoh masyarakat tertentu salah satunya adalah Bapak Miswar Selaku kepala Dusun dari Desa Balanti menyatakan

Saya pernah mendengar istilah CSR sebelumnya, namun saya tidak begitu terlalu tahu lebih jauh terkait CSR yang saya tahu CSR adalah bantuan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan(wawancara, 07 Februari 2017)

Sedangkan masyarakat umum tidak begitumengetahui mengenai istilah CSR, dari hasil wawancara dengan salah satu masarakat sekitar perusahaan Bapak Yunus, menyatakan:

Saya tidak pernah mendengar istilah CSR saya juga tidak tau Tanggung jawab sosial perusahaan tapi kalau berbicara mengenai bantuan perusahaan terhadap kami masyarakat sekitar iya ada beberapa tapi saya tidak tau apakah itu merupakan kegiatan CSR atau tidak (wawancara 08 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya mengetahui dengan istilah bantuan-bantuan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari saja. pemahaman masyarakat terkait CSR masih sangat kurang, perlunya sosialisasi mengenai apa itu CSR sangat penting untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan dari kebijakan CSR. Secara umum CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karena itu wajar bila suatu perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan tersebut.

Kehadiran PT Unggul Widya Teknologi Lestari telah memiliki dampak yang baik terhadap kehidupan perekonomian masyarakat sekitar. dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melihat hasil wawancara bersama Staff perusahaan yang khusus menangani persoalan CSR yaitu *Development Sustainability (ISPO)* ibu Nur Naini P. Menyatakan

Persoalan CSR itu merupakan Tugas dan Wajib dilakukan oleh kami pihak perusahaan dengan fokusnya berada pada masyarakat sekitaran perusahaan, program CSR dilakukan di beberapa wilayah sekitaran perusahaan terkhususnya kecamatan baras. Secara pelaksanaan kami telah melakukan sesuai dengan peraturan UU No. 47 tahun 2012 yang berlaku terkait CSR. (Wawancara 06 Februari 2017)

Tenaga kerja PT UWTL Ibu Hj Wati menyatakan:

“Dengan adanya perusahaan di daerah kami desa Motu itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian saya dan masyarakat yang ada disini karena hampir sebagian besar masyarakat disini bekerja di PT UWTL, ada yang sebagai staff, pengangkat buah, bahkan yang kerja dipabrik mayoritas adalah warga lokal asli dari daerah disini, jadi Sumber penghasilan kami pun juga bergantung dengan PT UWTL itu sebab kelapa sawit kami ketika telah berbuah kami bawa keperusahaan dan akan diolah oleh perusahaan, tentang bantuan atau program CSR ada bantuan yang dilakukan oleh perusahaan setau saya adalah bantuan perbaikan jalan, bantuan kesehatan misalnya membangun posyandu, bantuan pendidikan misalnya anak kuliah yang diberikan beasiswa oleh perusahaan langsung (*Wawancara, 09 Februari 2017*)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan CSR Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilihat dari ungkapan salah satu masyarakat mengatakan program-program CSR yang dilakukan perusahaan seperti dibidang kesehatan membangun posyandu, dibidang pendidikan terdapat pemberian beasiswa, dan dibidang Infrastruktur terdapat perbaikan jalan dan bentuk bantuan CSR lainnya.

Adapun Program CSR yang dilakukan pada Tahun 2016 telah diuraikan berbagai bidang kerja CSR sebagai berikut:

1. Bidang kesehatan

Pelaksanaan CSR di bidang kesehatan dengan jumlah biaya sebesar Rp.44,783,000.- sehingga program CSR dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Revitibilisasi posyandu

Gambar 6
Revitibilisasi Posyandu



Revitibilisasi posyandu merupakan program bidang kerja kesehatan dimana PT. UWTL melakukan program csr-nya dengan membangun satu posyandu yang ada di desa kasano dan pemberian kelengkapan alat posyandu di Desa Motu pada bulan juni dengan jumlah biaya sebesar Rp.20.783.000,- . hasil wawancara dengan bidan Wati di desa Motu menyatakan

“kami mendapatkan bantuan dari perusahaan dengan memberikan kelengkapan alat – alat posyandu untuk keperluan posyandu dan sangat membantu kami, karena kami memang membutuhkan dana untuk

membeli kelengkapan alat – alat posyandu”(Wawancara,14 Februari 2017)

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasano Bpk

Dg. Kille menyatakan:

“Di desa kami sendiri, kami mendapatkan bantuan dari perusahaan berupa pembangunan posyandu di desa kami, itu sangat membantu karena masyarakat disini memang sangat membutuhkan posyandu apalagi untuk ibu – ibu di desa kami”(Wawancara, 15 Februari 2017)

2) Kegiatan sunatan massal

Gambar 7

Kegiatan Sunatan Massal



Kegiatan sunatan masal dilakukan pada bulan november dengan jumlah peserta sebanyak 100 peserta di lakukan di kecamatan Baras dengan jumlah biaya sebesar Rp. 24.000.000,- hasil wawancara bersama salah satu orang tua dari seorang anak

yang mengikuti sunatan masal program CSR yaitu Hj. Darmiwati menyatakan:

“kami mendapatkan bantuan dari perusahaan berupa sunat masal yang di lakukan di kecamatan baras dan anak saya pun ikut di sunat pada saat itu pesertanya pun juga lumayan banyak dari berbagai desa”(wawancara, 15 Februari 2017)

Hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SDN Kapohu tempat dilakukanya Sunatan Masal, Bapak Lasarus Menyatakan :

“Waktu itu SD ini pernah digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan Sunatan Massal kalau tidak salah dua hari berturut - turut pada tanggal 29 – 30 Desember tahun kemarin, pesertanya juga rata-rata murid sd disini” (Wawancara, 16 Februari 2017)

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Camat Kecamatan Baras Abd Rakhman U terkait kegiatan sunatan masal menyatakan:

“kegiatan sunatan masal , sebenarnya saya tidak begitu tau karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak perusahaan. saya hanya sebatas mendengar kabar dari beberapa pegawai saya mengenai bantuan sunatan masal yang dlakukan PT UWTL, saya sangat mendukung akan hal itu karena dengan bantuan itu dapat membantu masyarakat sekitar kecamatan baras”(wawancara, 20 Februari 2017)

2. Bidang pendidikan dan kebudayaan

1) Bantuan buku sekolah

Gambar 8

Bantuan Buku Sekolah



dilaksanakan di SD Dusun Kapohu pada bulan desember.

hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SD Dusun

Kapohu Bapak Lasarus menyatakan :

“iya bantuan yang kami dapatkan dari perusahaan PT UWTL cukup membantu kami bantuannya berupa pemberian buku sekolah dan pada tahun sebelumnya kami juga mendapatkan bantuan dengan dibuatkannya jembatan untuk SD kapohu adapun bantuan yang diberikan oleh perusahaan sebanyak 50 buku untuk siswa SD kami terdapat buku pelajaran dan berbagai buku – buku yang menunjang semangat belajar anak anak Siswa SD kami “(wawancara, 15 Februari 2017)

2) Proyek perubahan taman belajar

Gambar 9
Proyek Perubahan taman belajar



dilaksanakan di taman belajar Vovasanggayu pada bulan Juni dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- adapun hasil wawancara bersama salah satu masyarakat Ibu Hj. Wati menyatakan :

“pembuatan taman belajar dilakukan pada tahun sebelumnya, tahun ini perusahaan melakukan perubahan – perubahan dari segi tatanan taman yang terlihat lebih menarik sehingga anak saya sering ke taman belajar bersama teman – temannya dan itu sangat bermanfaat karena dapat memotivasi anak saya untuk rajin belajar bersama teman - teman”
(Wawancara, 15 Februari 2017)

3) Honorarium guru SD dan TK, diberikan kepada Guru SDN Bulili dan TK Widya dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dengan biaya sebesar Rp. 33.000.000,- adapun hasil wawancara bersama salah satu Guru dari TK Widya Ibu Safitri menyatakan:

Iya, saya salah satu Guru TK yang mengajar di TK binaan PT. Unggul Widya dan di gaji langsung oleh perusahaan perbulannya saya mendapatkan Rp. 300.000 ribu karena saya masih berstatus guru Honorer. (Wawancara pada 19 Februari 2017)

3. Bidang infrastruktur

1) Renovasi tempat ibadah,

Gambar 10

Renovasi Tempat Ibadah



dilakukan di salah satu tempat ibadah di sekitar Perusahaan PT. UWTL dilaksanakan secara Rutin setiap bulannya dengan biaya sebesar Rp.12.000.000,- adapun hasil wawancara bersama salah satu Pendeta dari Gereja di sekitar Perusahaan Pendeta Albert menyatakan:

“ Gereja kami gereja yang paling dekat dengan perusahaan bantuan yang diberikan perusahaan untuk gereja ini adalah renovasi, dan pemberian kelengkapan – kelengkapan gereja, misalnya saja Kursi dan berbagai keperluan Gereja dan Hampir setiap bulan dilakukan pengecekan untuk melihat kondisi gereja” (Wawancara, 18 Februari 2017)

Adapun hasil wawancara bersama pengurus Masjid Pak H. Muslimin, menyatakan

“iya masjid ini mendapatkan bantuan berupa renovasi perbulannya, untuk melihat kondisi dan keadaan masjid jika mengalami kerusakan maka Tim dari perusahaan akan segera memperbaiki, misalnya saja atap masjid yang sempat mengalami kerusakan, pembersihan sekitar lingkungan masjid itu semua merupakan bantuan dari perusahaan” (Wawancara, 18 Februari 2017)

2) Perbaikan kualitas jalan,

Gambar 11

Perbaikan Kualitas Jalan



dilakukan disekitar jalan perusahaan, dibuatkan jalan tani untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan. Adapun hasil wawancara bersama masyarakat bapak Hj Tirro menyatakan“

Memang ada jalan yang di perbaiki oleh perusahaan, jalan itu sering dilalui oleh mobil – mobil pengangkut

buah perusahaan, dan sering saya gunakan untuk pergi kekebun . bantuan dari perusahaan sangat membantu karena sebelumnya jalan itu sangat susah digunakan bahkan pengguna motor tidak bisa masuk hanya bisa dilalui pejalan kaki saja, namun sekarang sudah bagus mobil pun sudah bisa masuk(Wawancara, 20 Februari 2017)

4. Bidang lingkungan

1) Penanaman Tanaman Konservasi (Bakau)

Gambar 12

Penanaman Tanaman Konservasi



penanaman tanaman bakau ini dilakukan di Muara Sungai Majene sebanyak 10.000 tanaman bakau pada bulan april – juni dengan biaya sebesar Rp.35.000.000,- adapun hasil wawancara bersama pihak perusahaan yang menangani persoalan *CSRDevelopment Sustainability (ISPO)* Ibu Nur Naini P, menyatakan

“ Kondisi daerah sempadan pantai muara sungai majene di Desa Kasano, Kecamatan Baras sangat kritis lahan dengan luas lebih dari 500Ha ini terlantar setelah pasang air laut. Oleh sebab itu kami pihak perusahaan bersama pemerintah daerah (mamuju dan mamuju utara) serta masyarakat sekitar berkolaborasi dan berkerjasama untuk mengembalikan fungsi sempadan pantai dengan menanam tanaman konservasi (Mangrove) penanaman ini dilakukan sejak 2014 hingga 2016 ”(Wawancara, 06 Februari 2017)

2) Penanaman Bambu di Sempadan Sungai,

Gambar 13

Penanaman Bambu di Sempadan Sungai



penanaman bambu dilakukan di sempadan sungai di PT UWTL pada bulan augustus – oktober. Hasil wawancara bersama *Development Sustainability (ISPO)* Ibu Nur Naini P, menyatakan :

“Kami melakukan program *csr* disekitaran sungai sempadan untuk melindungi kawasan sempadan sungai, secara periodik PT UWTL menyelenggarakan kegiatan konservasi daerah aliran sungai dengan cara pemasangan amaran – amaran dan penanaman areal sempadan sungai dengan tanaman yang bermanfaat

dan mencegah longsor, seperti tanaman bambu, sepanjang aliran sungai yang melewati PT UWTL, telah dilakukan pemasangan amaran yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kawasan sempadan sungai” (Wawancara, 06 Februari 2017)

3) Sekolah 3R

Gambar 14

Sekolah 3R



merupakan kegiatan pelatihan lingkungan hidup disekitar perusahaan PT UWTL namun belum ter-realisasi foto diatas adalah kegiatan sekolah 3R tahun 2015. Hasil wawancara bersama *Development Sustainability* (ISPO) Ibu Nur Naini P, Menyatakan

“ untuk program sekolah 3R tahun 2016 belum terlaksana karena terdapat beberapa kendala sehingga program sekolah 3R tidak bisa dilaksanakan, namun program ini telah sering dilaksanakan di tahun – tahun sebelumnya” (Wawancara, 06 Feruari 2017)


5. Perayaan Hari Besar Nasional

1. Bantuan perayaan hari lingkungan Hidup, dilakukan di masyarakat sekitar perusahaan pada bulan juni dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- hasil wawancara bersama ketua panitia hari besar Nasional sekitar perusahaan Bapak Anto , menyatakan:

Kegiatan hari nasional yang kami lakukan pada saat itu memang betul ada bantuan dari perusahaan, bantuan dana, bantuan aula yang digunakan itu semua berasal dari bantuan perusahaan dalam melaksanakan perayaan hari besar nasional(wawancara, 19 Februari 2017)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akan dapat disajikan laporan bantuan CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara selama tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9.
Program CSR Pada Tahun 2016



PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI

PT BARAKUS LAWENI BARAT

WIDYA CORPORATION

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA PERENCANAAN AWAL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016												Data Akhir Perencanaan	SASARAN PROGRAM	
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
A. INFRASTRUKTUR																		
1	Renovasi tempat ibadah	Kondisi tempat ibadah mengalami perbaikan	6														6	Tempat ibadah di sekitar PT UWTL
2	Perbaikan kualitas jalan	Kondisi jalan mengalami perbaikan	10														3	
B. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1	Bantuan buku sekolah	Jumlah sekolah yang diberi bantuan	2														1	SD Kapohu
2	Proyek perubahan taman belajar	Facilitas dan sistem belajar mengajar mengalami perbaikan	1															Taman Belajar Vovassangayu
3	Honorarium guru SD dan TK	Honorarium guru dibayarkan secara rutin																Guru SDN Bulili dan TK Widya
C. KESEHATAN																		
1	Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu yang dibangun	1														1	Desa Kasano
2	Kegiatan Sunatan Massal	Jumlah posyandu yang diberi kelengkapan alat	9														9	Desa di Desa Mota
3		Jumlah peserta	100														100	Kecamatan Baras
D. PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL																		
1	Bantuan perayaan hari lingkungan hidup																	
E. KONSERVASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN																		
1	Penanaman Tanaman Konservasi (bakau)	Luasan lahan yang ditanami bertambah	10.000														10.000	Muara Sungai Majene
2	Penanaman Bambu di Sempadan Sungai	Luasan lahan yang ditanami bertambah	1.000														1.000	Sempadan Sungai di PT UWTL
3	Sekolah JR	Jumlah peserta pelatihan																Masyarakat sekitar perusahaan

Keterangan

Rencana Realisasi

Keterangan



Rencana Realisasi

Dari uraian program – program kerja beserta data sekunder program kerja CSR tahun 2016 PT Unggul Widya Teknologi Lestari terdapat 5 Bidang kerja CSR. Dalam peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada pasal 11 terdapat 10 Bidang kerja CSR yaitu

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Olahraga dan seni budaya
5. Sosial dan keagamaan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Usaha ekonomi kerakyatan
8. Penanggulangan bencana
9. Pemberdayaan masyarakat adat dan
10. Bidang kerja lainnya yg secara nyata memberikan dampak peningkatan kuitas masyaraat

Dari 10 bidang kerja CSR hanya 6 bidang kerja CSR yang dilaksanakan oleh PT Unggul Widya Teknologi Lestari . bidang kerja yang dilakukan hanya bidang kerja pendidikan, kesehatan, infrastrutur, sosial dan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan Hidup. Dari hasil wawancara bersama *Development Sustainability* ibu Nur Naini P , menyatakan :

Dalam penentuan program CSR, kami pihak perusahaan menentukan program melalui analisis kebutuhan masyarakat sekitar, kita selalu melakukan Survei dalam penentuan program CSR apa yang di butuhkan masyarakat. Dan program CSR yang kami lakukan yang betul – betul di butuhkan oleh masyarakat. (Wawancara, 06 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dan perolahan data bahwa program CSR yang telah dilakukan oleh PT UWTL pada tahun 2016, telah dilaksanakan program CSR dengan berbagai Bidang kerja CSR, yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utaradimana bidang kerja CSR yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Olah raga dan seni budaya, Sosial dan Keagamaan, Pelestarian lingkungan hidup, namun tidak semua bidang kerja CSR dilaksanakan dari 10 bidang Kerja CSR terhitung hanya 6 saja bidang kerja CSR yang dilaksanakan

Implementasi CSR PT UWTL dalam peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah PT UWTL laksanakan dalam beberapa tahun ini. PT UWTL telah melaksanakan berbagai kegiatan diberbagai bidang yang telah mencakup dalam ruang lingkup program bantuan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan .

Dampak program CSR tidak bisa dirasakan secara instan, namun mayoritas dari masyarakat yang menerima bantuan merasakan dampak yang positif, karena desa mereka yang dibantu kelengkapan alat seperti bantuan pendidikan, kesehatan dan yang lainnya namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak merasakan dampak dari program CSR

PT UWTL, dari hasil wawancara bersama masyarakat Desa Balanti Ibu

Andi Tini menyatakan :

Bantuan yang diberikan masyarakat dari PT UWTL belum sepenuhnya merata, karena desa kami yang tidak begitu jauh dari perusahaan dan sering dilalui oleh mobil mobil PT UWTL sampe selama ini belum ada bantuan yang diberikan entah itu bantuan perbaikan jalan maupun bantuan pendidikan padahal kami juga mengharapkan bantuan dari perusahaan minimal perbaikan jalan , karena jalan itu sering dilalui oleh mobil mobil pengangkut buah perusahaan PT UWTL bantuan hanya diberikan kepada Desa Motu (Wawancara, 07 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan program CSR PT UWTL menurut masyarakat belum merata, bantuan yang diberikan lebih berfokus pada satu desa saja yaitu desa Motu, dimana desa itu adalah tempat dari perusahaan beroperasi, padahal jarak Desa balanti dengan PT UWTL ini terbilang sangat dekat apalagi mobil mobil PT UWTL yang sering melalui jalan desa tersebut sering mengalami kerusakan di akibatkan mobil pengangkut buah yang memiliki beban berat sehingga membuat kualitas jalan menjadi buruk. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Balanti Bapak M. Naim menyatakan

Memang ada beberapa jalan yang rusak di akibatkan mobil pengangkut buah perusahaan yang lewat dengan muatan yang berat, kami pernah memajukan permohonan bantuan terkait jalanan yang rusak itu, pihak perusahaan mengatakan akan memperbaiki jalan tersebut namun hingga sekarang belum diperbaiki(Wawancara, 06 Februari 2017)

Hasil wawancara terkait pembahasan di atas bersama staff khusus yang menangani persoalan CSR *Development Sustainability* (ISPO) Ibu Nur Naini P menyatakan:

Untuk program CSR memang tidak semua desa bisa kami berikan bantuan secara penuh, karena kami memiliki prioritas desa mana yang lebih membutuhkan, dalam menentukan program CSR dan sasarannya kami melakukan survei kebutuhan masyarakat sekitar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak program CSR tidak semuanya mendapatkan bantuan, walaupun semua desa ingin dibantu dana yang disiapkan oleh perusahaan akan melebihi dari 3% keuntungan perusahaan (Wawancara, 06 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara bersama staff PT UWTL mengatakan bahwa dalam menentukan program CSR PT UWTL melakukan survei kebutuhan dan setelah melakukan survei kebutuhan maka ditentukan lah program CSR beserta sasaran dimana akan dilaksanakan program CSR.

Konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional. Pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak dapat menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Dalam pelaksanaan program

CSR , pola kemitraan pemerintah dan Swasta dalam hal ini PT UWTL sangatlah penting karena dalam menerapkan kebijakan CSR harus ada komunikasi yang terbangun antara keduanya

Terkait peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan CSR perlu melakukan koordinasi dan sepengetahuan pemerintah daerah dan tim pengawas dari pemerintah daerah. dalam pasal 22 Perda No 5 Tahun 2015 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Mamuju Utara menyebutkan , penyelenggaraan program CSR yang dilakukan harus sepengetahuan pemerintah daerah dan tim pengawas CSR, dengan memenuhi beberapa mekanisme dan prosedur program CSR. Diantaranya penyusunan rencana program dan kegiatan CSR atas usulan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan CSR kepada Bupati dan Tim pengawas CSR dan meminta persetujuan pelaksanaan program CSR kepada Bupati atas pertimbangan Tim pengawas bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Mamuju utara . dalam hasil wawancara bersama Pak Wakil Bupati Drs. H. Muhammad Saal, menyatakan

Persoalan CSR sangatlah penting di daerah ini karena banyak perusahaan besar yang ada di daerah ini, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan dalam

melakukan aktivitas CSR harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, entah peraturan daerah yang telah dikeluarkan maupun peraturan yang memang sudah ada sebelum diterbitkannya peraturan daerah, namun kenyataan dalam implementasinya memang sangat memprihatinkan terdapat beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR diluar sepengetahuan kami tanpa melakukan koordinasi sebelumnya menentukan program CSR tanpa melibatkan pihak pemerintah (Wawancara, 03 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, hubungan pemerintah dan Perusahaan sangat kurang seperti yang dikatakan Bapak Wakil Bupati perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR jarang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terkait pola hubungan pemerintah dan perusahaan, adapun wawancara bersama salah satu staff bidang CSR Ibu Nur Nainy P menyatakan,

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR pemerintah tidak aktif terlibat, pihak pemerintah pernah datang ke perusahaan kami tahun 2015 lalu hanya melakukan sosialisasi Perda namun sosialisasinya Perda hanya berupa draft saja belum ada legalitas dari pak bupati, terkait tim pengawas CSR yang disebutkan dalam Perda , kami sama sekali belum pernah dikunjungi oleh Tim Pengawas dan kami selalu melaporkan hasil kegiatan CSR kami kepada pemerintah (Wawancara, 06 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR berdasarkan Peraturan daerah yang telah dibuat. Hal itu menandakan bahwa dalam implementasi program CSR tidak maksimal karena tidak berlandaskan pada Perda, pemerintah tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan perusahaan juga tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam melakukan program CSR.

Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan daerah no. 5 Tahun 2015 Kabupaten Mamuju Utara dinilai berdasarkan beberapa variable implementasi menurut teori dari Van Meter dan Van Horn yaitu :

4.3.2 Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Adapun hasil wawancara bersama dengan pihak perusahaan Bagian CSR *Dept Sustinibility*, Ibu Nur Naini P , menyatakan

“ Tujuan dari kami melakukan kegiatan program CSR adalah dengan berlandaskan dari salah satu misi perusahaan yaitu peduli terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Tujuan di lakukannya CSR adalah dimana keberadaan perusahaan memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, dampak positifnya adalah terlihat dari kesejahteraan masyarakat, kami percaya perusahaan yakin bahwa pertumbuhan perusahaan harus dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, oleh karena itu beberapa program dilaksanakan

sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap perkembangan masyarakat “(Wawancara, 07 Februari 2017)

Adapun Hasil wawancara terkait pertanyaan yang sama bersama Kepala Desa Balanti, Bapak M. Naim,

“Maksud dan tujuan dari CSR kalau yang saya tau itu adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar ”(Wawancara, 06 Februari 2017)

Hasil wawancara terkait pertanyaan yang sama bersama Camat Kecamatan Baras A Rakhman M, menyatakan

“ CSR tujuannya adalah tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat yang berada sekitar wilayah perusahaan, sesuai perundang – undangan 3% keuntungan laba perusahaan setelah potong Pajak di peruntukan untuk masyarakat sekitar (wawancara 07 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dengan berbagai implementator terkait bahwa jelas mereka paham betul dengan ukuran dan tujuan kebijakan namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat berbagai masalah.

4.3.3 Sumber daya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan

sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi tanggung jawab sosial.

a. Sumber daya manusia

Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumberdaya manusia, hasil wawancara dengan Ibu Nur Naini P, S.H menyatakan:

"Terkait Sumber daya, pihak perusahaan sangat memperhatikan hal itu, bisa dilihat dengan adanya staff khusus yang menangani langsung terkait program CSR disebut dengan *Departemen Sustainability (ISPO)*. dan orang – orang yang di pilihpun yang menangani CSR ini adalah orang – orang yang di anggap mampu dan berkompeten dalam hal CSR ini sesuai dengan pendidikan yang digeluti sebelumnya(wawancara, 06 Februari 2017)

Hasil wawancara terkait pertanyaan yang sama bersama Bapak Wakil Bupati menyatakan:

dalam peraturan daerah terdapat tim pengawas khusus yang menangani persoalan CSR, namun itu belum di rampungkan siapa – siapa yang menjadi tim pengawas.Karena kami masih kesulitan mendapatkan orang yang paham betul tentang CSR sehingga belum ditetapkan siapa – siapa yang menjadi tim Pengawas (Wawancara, Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, terkait sumber daya manusia yang kurang memahami persoalan CSR kurang optimalnya implementasi kebijakan CSR salah satunya adalah belum adanya Tim Pngawas CSR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Daerah sehingga dalam bentuk pengevaluasi program CSR yang dilakukan perusahaan tidak berjalan dengan baik .

b. Sumber daya Finansial

Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program , bahkan terkadang program memerlukan budget yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program CSR yang akan dilakukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur Nainy P dept Sustainability perusahaan menyatakan:

Sumber dana kegiatan CSR adalah keuntungan laba dari perusahaan, keuntungan laba tersebut 3% sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wawancara, 06 Februari 2017)

Adapun hasil wawancara terkait sumber daya finansial bersama bapak Camat Kecamatan Baras Bapak Abd. Rakhman U menyatakan:

Sumber dana dari program CSR jelas berasal dari perusahaan 3% setelah potong pajak, namun pihak perusahaan tidak begitu transparan terkait program CSR dan sumber dana dalam pelaksanaannya apakah dana program CSR yang dilakukan sesuai dengan perundang – perundangan atau tidak (Wawancara, 07 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program CSR yang dilakukan memang berasal murni dari keuntungan perusahaan, namun

apakah itu berasal dari 3% setelah potong pajak tidak dijelaskan secara rinci, perusahaan hanya memberikan rincian anggaran yang digunakan untuk program CSR, ada pun rincian anggarannya sebagai berikut

Tabel 10.
Rekapitulasi Anggaran CSR per-Tahun 2011 – 2016

Tahun	Total Anggaran
2011	Rp.203,083,333,-
2012	Rp.308,500,000,-
2013	Rp.1,302,704,771,-
2014	Rp.790,000,000,-
2015	Rp.1,008,297,951,-
2016	Rp.898,044,561,-

Sumber : PT Unggul Widya Teknologi Lestari

4.3.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam pengimplementasian suatu program, karakter dari para pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Kinerja implementasi tanggung jawab sosial akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya yang menangani program CSR Ibu Hj. Nurhayati, Bidang HRD menyatakan,

Dalam penerapan program CSR perusahaan telah membentuk departemen khusus yang menangani persoalan CSR yang diberi nama Departemen Sustainability (ISPO) dimana departemen khusus ini terdiri dari 3 orang diantaranya Nur Naini P, Sandi A, dan Khalim, mereka

adalah orang – orang yang cekatan dan paham mengenai CSR (Wawancara, 10 Februari 2017)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menangani persoalan CSR di perusahaan adalah orang – orang yang berkompeten dan paham betul persoalan CSR, namun disisi masyarakat sekitar perusahaan berkenaan dengan karakter kurang terbuka dengan program – program yang dilaksanakan , berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Motu Ibu Ayu menyatakan

Pengurus CSR perusahaan kurang begitu terbuka kepada masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program – program CSR terdapat beberapa proposal bantuan yang kami masukkan keperusahaan kadang tidak diterima, walaupun diterima kami harus menunggu dalam waktu yang agak lama, misalnya dalam peminjaman alat berat perusahaan, serta bantuan perbaikan jalan (Wawancara, 12 Februari 2017)

4.3.5 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi tanggung jawab sosial. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat

kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Komunikasi didalam dan antara organisasi organisasi merupakan suatu program yang sangat kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan pesan kebawahdalam suatu organisasi atau dari satu oragnisasi ke organoisasi alinnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu , jika sumber sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud maksud kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hj Nurhayati Staff Bidang HRD mengatakan bahwa :

komunikasi yang terjalin antara saya dengan staff Khusus yang menangani persoalan CSR cukup lancar, juga terus melakukan koordinasi dengan saya selama pelaksanaan program ini, sebab pada dasarnya kebijakan penuh dipegang General Manager lalu ke saya selaku Staff Bidang HRD. (Wawancara, 20 Februari 2017).

Bantuan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan memandirikan masyarakat melalui potensi yang ada . Yang paling penting dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat mengetahui adanya program yang dilaksanakan dan apa hal yang ingin dicapai. Namun kenyataanya dilapangan penulis melihat bahwa tidak

semua masyarakat tahu akan adanya program bantuan dari perusahaan CSR yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial itu sendiri ini. Keterlibatan stakeholder dalam penyampaian program ini menjadi kunci utama dalam kesuksesan program tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mapatappu mengenai keberadaan program ini, beliau menyatakan bahwa :

Bantuan dari perusahaan itu ada beberapa pada wilayah tertentu saja khususnya di Desa Motu karena di situ adalah Titik lokasi dari perusahaan namun saya tidak tau apakah itu merupakan bantuan CSR dari perusahaan atau tidak, (Wawancara, 21 Februari 2017)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Balanti Bapak M. Naim menyatakan terkait pertanyaan yang sama menyatakan

Pihak perusahaan jarang melakukan pola koordinasi bersama kami dalam melakukan program bantuan, kita kadang mengirim proposal bantuan baru di berikan bantuan , biasanya bantuannya alat berat dan perbaikan jalan, kalau dalam menentukan program CSR kami tidak dilibatkan (Wawancara, 07 Februari 2017)

Dalam hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hubungan dan pola komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat kurang baik, terlihat dalam penentuan program – program CSR yang seharusnya melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan melakukan musyawarah bersama namun kenyataannya tidak dilibatkan dalam penentuan program, masyarakat hanya disuruh untuk memberikan proposal jika ingin di bantu oleh perusahaan.

Bukan hanya pola hubungan antara pihak perusahaan dan masyarakat saja namun Komunikasi antara pemerintah dan pihak perusahaan jug merupakan hal yang sangat penting telah dijelaskan dalam peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyatakan penyelenggaraan atau pelaksanaan program CSR harus sepengetahuan Bupati/Wakil Bupati dan Tim Pengawas CSR. Namun, kenyataanya di lapangan penulis melihat bahwa tidak ada pola komunikasi yang terbangun antara pemerintah dan pihak perusahaan, seperti dalam hasil wawancara bersama Wakil Bupati Mamuju Utara Drs. H. Muhammad Saal menyatakan:

Pola koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan tidak berjalan dengan baik, pihak perusahaan jarang melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam melaksanakan program pun tidak ada pemberitahuan sama sekali . kami selalu menghimbau kepada hampir seluruh perusahaan yang ada di mamuju utara untuk melaksanakan program CSR sesuai dengan peraturan namun dalam implementasinya belum sesuai.(wawancara, maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa komunikasi antara pemerintah dengan pihak perusahaan sangat kurang terlihat dari penjelasan bapak Wakil Bupati menyatakan pihak perusahaan jarang melakukan koordinasi terkait program CSR hal itu ditanggapi oleh pihak perusahaan dalam hasil wawancara bersama pihak perusahaan Staff Khusus CSR Dept Sustainability (ISPO) Ibu Nur Nainy P menyatakan,

kami dalam melakukan program CSR telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu UU no. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, kami tidak berlandaskan Perda karena Perda sendiri baru disosialisasikan hanya berupa draft jadi

Perda No 5 tahun 2015 menurut kami belum sah karena tidak ada Tanda Tangan langsung dari Pemerintah Daerah. (wawancara 06 Februari 2017)

Melihat kondisi yang ada dilapangan dan hasil wawancara mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana program penulis merasa sangat kurang pola komunikasinya , terlihat dalam menentukan program CSR tidak disampaikan langsung tapi melalui proposal permohonan bantuan. Media komunikasi yang seperti ini sangat menghambat kelancaran penyampaian pesan

Dengan melihat realita diatas penulis berkesimpulan bahwa komunikasi pada tataran pelaksana (implementor) dalam mengkordinasikan program tidak berjalan lancar, begitupun dengan komunikasi kepada masyarakat sebagai penikmat program tidak berjalan secara maksimal

4.3.6 Disposisi atau sikap para pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana. Pemahaman mereka secara umum maupun secara rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Sikap para pelaksana terhadap kebijakan Tanggung Jawab Sosial

perusahaan menunjukkan dukungan dan keterbukaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana dapat digambarkan berdasarkan Kemampuan kognitif sebagai indikator persepsi atau pendapat dari pelaksana kebijakan dalam lingkup dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Kemampuan kognitif yang meliputi pemahaman terhadap tujuan kebijakan CSR yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan Staff GM bidang HRD Perusahaan Ibu Hj Nurhayati menyatakan

Pemahaman soal CSR semua tahu persoalan itu bukan hanya staff khusus yang menangani CSR saja yang mengetahui tapi staff yang lain semua telah paham betul apa yang dimaksud dengan CSR, tujuan, sasarannya dan sempat dilukukanyaa sosialisasi oleh pemerintah daerah mengenai Perda CSR dan hampir seluruh staff ikut pada sosialisasi tersebut , (Wawancara 20 Februari 2017)

Kebijakan CSR telah disosialisasikan sebelumnya oleh pemerintah daerah, dan diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi tersebut oleh Manager. Hal ini disebabkan oleh latar belakang ilmu pendidikan dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda misalnya masih ada beberapa yang hanya lulusan SLTA dan Paket C, ketidakpahaman yang dimaksud adalah, pemahaman tujuan kebijakan, pemahaman terhadap sejauh mana program telah terealisasi, dan pemahaman terhadap arah kebijakan.

4.3.7 Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan external dalam hal ini lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Mengenai keterlibatan unsur politik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial ini. Hasil wawancara bersama Ibu Hj Nurhayati, menyatakan

tidak ada unsur politik dalam pelaksanaan program CSR, memang ada beberapa upaya yang dilakukan masyarakat yang merupakan caleg untuk mempolitisasi program ini, namun ditolak” (Wawancara, 20 Februari 2017).

Untuk lingkungan sosial dan ekonomi ibu Hj Nurhayati menyatakan

Pelaksanaan program ini memang mempertimbangkan unsur sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, misalnya dalam penentuan program CSR Tim khusus CSR dalam hal ini dept. Sustainability melakukan survei kebutuhan masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang akan dijadikan sasaran dari program CSR. (Wawancara, 20 Februari 2017)

Dalam hal ini penulis setuju tentang tidak adanya pengaruh faktor politis, untuk lingkungan sosial dan ekonomi penulis melihat hal ini kurang diperhatikan oleh implementor, mengenai kondisi sosial ekonomi yang dikatakan pihak perusahaan dengan melakukan survei kebutuhan, seharusnya tidak hanya itu alangkah baiknya dalam penentuan program masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan program CSR sehingga program CSR lebih tepat sasaran.

4.4. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang CSR pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara

Kekurangan dan keberhasilan yang ditunjukkan oleh Perusahaan PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan program program dari kebijakan CSR yang di muat dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan itu jelas ada hal yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penulis membagi hal atau faktor tersebut menjadi dua yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan

4.4.1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya adalah:

- a. Undang – undang yang mengatur

Pelaksanaan program CSR tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat . dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program CSR di PT Unggul widya Teknologi Lestari ini adalah Undang – undang yang mengatur terkait CSR, UU no 40 Tahun 2007 lalu Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan hal ini dipertegas oleh salah satu staff Perusahaan Ibu Nur Nainy P menyatakan

Dilakukannya program CSR salah satu latar belakang kami melakukan program CSR karena adanya aturan yang mengatur akan hal itu, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(Wawancara, 06 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa salah satu faktor pendukung dari terlaksananya program CSR ini adalah undang – undang yang mengatur terkait kebijakan CSR.

b. Sumber daya Manusia yang tersedia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud merupakan para Staff Perusahaan yang terlibat dan bekerja langsung terkait pelaksanaan program CSR merupakan pendukung utama dari implementasi kebijakan tersebut, dengan adanya divisi atau departemen khusus yang menangani program CSR yaitu departemen sustainability (ISPO) yang terdiri dari 3 orang . Dalam wawancara yang dilakukan bersama Staff GM bidang HRD perusahaan Ibu Hj. Nurhayati menyatakan bahwa :

”perusahaan sendiri memiliki departemen khusus yang menangani persoalan CSR, yaitu Departemen Sustainability (ISPO) yang terdiri dari 3 orang, secara struktur memang hanya 3 orang dan itu terbilang sedikit namun pada dasarnya staff yang lain juga turut melaksanakan program CSR bersama sebagai tanggung jawab kami semua(Wawancara 20Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasumber daya manusia yang tersedia khususnya departemen bagian CSR dimana departemen ini yang menangani langsung segala yang berkaitan dengan CSR, dengan adanya departemen ini bahwa bisa dikatakan perusahaan memperhatikan program – program CSR yang dilakukan.

4.4.2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa faktor pendukung penghambat diantaranya adalah:

a. hubungan pemerintah dan perusahaan

faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan CSR salah satunya adalah pola hubungan pemerintah dan perusahaan terlihat jelas dalam Sub Bab sebelumnya yang dijelaskan bahwa kurang baiknya pola hubungan pemerintah dan perusahaan misalnya komunikasi yang kurang terbangun dalam penyelenggaraan Program CSR yang dilakukan, dalam penyusunan rencana program dan kegiatan CSR pemerintah tidak terlibat, tidak melakukan persetujuan pelaksanaan program CSR kepada Bupati berdasarkan pertimbangan tim Pengawas sesuai dengan Perda yang telah dikeluarkan. hasil wawancara dengan Bapak wakil Bupati Mamuju Utara Drs.H. Muhammad Saal mengatakan bahwa

dalam pelaksanaan program CSR perusahaan jarang melakukan komunikasi dengan kami sebelumnya, padahal kami telah menghimbau kepada seluruh perusahaan dalam melaksanakan program CSR harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana peraturan daerah menjelaskan mekanisme dan prosedur program CSR yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. (Wawancara 03 maret 2017)

namun hasil wawancara bersama, *Development Sustainability* Ibu Nur Nainy P menyatakan bahwa:

pemerintah belum pernah mendatangi atau berkunjung keperusahaan kami guna menanyakan persoalan CSR, Perda No 5 Tahun 2015 baru sekali di sosialisasikan itupun hanya berupa draft tidak memiliki legalitas dari pemerintah daerah (Wawancara, 06 Februari 2017)

berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan pemerintah dan perusahaan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan CSR.

b. Pemahaman masyarakat tentang CSR

salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan CSR adalah pemahaman masyarakat tentang CSR, penting untuk diketahui oleh masyarakat karena sasaran dari kebijakan CSR ini adalah masyarakat, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Motu mengatakan

saya tidak tau kalau ada bantuan khusus yang dilakukan perusahaan,saya juga tidak pernah mendengar istilah CSR atau tanggung Jawab sosial perusahaan(wawancara, 21 Februari 2017)

dari hasil wawancara , dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang adanya bantuan perusahaan itu sebagai salah satu faktor penghambat, karena dengan ketidakpahaman masyarakat, pihak perusahaan akan melakukan program CSRnya sesuai kemauan perusahaan tanpa mempertimbangkan usul saran dari masyarakat. Seharusnya dalam penetapan program CSR harus melibatkan masyarakat.

c. Upaya pemerintah

salah satu faktor penghambat yaitu Upaya Pemerintah, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya lebih aktif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan CSR ini khususnya pada PT UWTL . Pemerintah dan perusahaan Swasta merupakan Mitra Kerja dan seharusnya hubungan keduanya terbangun dalam proses implementasi kegiatan CSR, namun dalam hasil wawancara bersama salah satu staff yang menangani persoalan CSR Ibu Nur Nainy P menyatakan.

Pemerintah belum pernah melakukan pengawasan terhadap perusahaan kami dan kami juga tidak tau siapa yang menjadi Tim Pengawas CSR sesuai perda no. 5 Tahun 2015 , perda juga baru sekali disosialisasikan dalam bentuk draft tanpa legalitas dari pemerintah daerah setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah (Wawancara, 06 Februari 2017)

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Wakil Bupati Drs. H. Muhammad Saal, menyatakan

Tim pengawas CSR memang ada disebutkan dalam Perda, namun belum berjalan dengan baik karena ada beberapa kendala, salah satu kendalanya yaitu belum diterbitkannya SK khusus untuk Tim Pegawai sendiri, kalau pun mengenai aturan, bukan hanya Perda namun ada undang – undang yang mengatur terkait kegiatan CSR (Wawancara, 03 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor penghambat kurang optimalnya implementasi kebijakan CSR adalah upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Tugas Tim Pengawas CSR, disebutkan bahwa Tim Pengawas CSR belum bisa berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan perusahaan melakukan kegiatan CSR

diluar pengawasan Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Tim Pengawas CSR yang belum terbentuk secara sah.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Kebijakan CSR Pada PT Unggul Widya Teknoloi Lestari Kabupaten Mamuju Utara. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara telah terlaksana namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan Hal tersebut dikarenakan, Peraturan Daerah mengenai CSR ini belum digunakan sepenuhnya oleh perusahaan, dan masih terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah tersebut.
2. yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah CSR meliputi dua faktor yaitu Faktor penghambat dan Faktor pendukung. Faktor pendukung meliputi Dasar Hukum atau undang undang yang mengatur sebagai salah satu acuan perusahaan melakukan kegiatan CSR, serta sumber daya manusia yang tersedia, sedangkan faktor penghambat seperti hubungan pemerintah dan

perusahaan yang kurang baik, pemahaman masyarakat terkait CSR yang masih kurang, dan upaya pemerintah dalam menangani persoalan CSR masih lamban

5.2 Saran

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran - saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada perusahaan – perusahaan yang ada dalam melakukan kegiatan program CSR harus berlandaskan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan CSR harus memperhatikan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dan dalam melakukan kegiatan CSR pola hubungan perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat perlu diperhatikan
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah CSR perlu melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan, dalam hal ini pelaksanaan program atau kegiatan CSR harus atas sepengetahuan pihak pemerintah melalui koordinasi, dan harus dilakukannya pengawasan yang baik dan evaluasi yang rutin dilakukan
3. Peraturan Daerah terkait CSR Ini seharusnya menjadi kebijakan unggulan di Kabupaten Mamuju Utara dilihat dari sumber daya alam yang melimpah dengan kehadiran perusahaan – perusahaan besar

yang melakukan operasional di kabupaten mamuju utara , kebijakan ini ditempatkan dalam prioritas utama karena kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Tarwiyah. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Agustino,Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Alfitri. 2011. *Community Development : Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Azheri, Busyra. 2011.*Corporate Social Responsibility : dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta .Raja Grafindo Persada.

Deddy Mulyadi, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn. 2005, *Model Implementasi Kebijakan* Jakarta: Gramedia

Gaffar, Afan, (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.

Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Hamdi, Muchlis.2013. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hasrat, Arief Saleh. DKK.2013. *Pedoman Penulisan Proposal Usulan Penelitian dan Skripsi*. Makassar.

Ife, Jim Dan Tesoriero Frank. 2008. *Community Development : Alternative Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Indahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Kartini, Dwi.2009. Coporate Sosial Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Development Dan Implementasinya Di Indonesia. Bandung. Refika Adiatma

Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. Corporate Social Responsibility; Doing the Most Good you're your Company and Your Cause NewJersey; JohnWiley& Sons,Inc.

Nugroho,Riant.2014. Kebijakan publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Primahendra, Riza. 2011. Public Relations & Corporate Social ResponsibilityJakarta: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat :kajian strategis pembangunan kesejahteraan social dan pekerjaan social.Bandung: Refika Adiatma

Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility : From Charity To Sustainability. Jakarta. Salemba Empat

Trihastuti Nanik.2013.Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia.Malang.Setara Press

Untung, Hendrik Budi, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Urip, Sri.2014.Strategi CSR.Tangerang Selatan: Lentera Hati

Wahab,Solichin Abdul, 1997. Analisis Kebijakan Dari formulasi kebijaksanaan Ke implementasi kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi.2007.Kebijakan Publik: Teori dan Proses.Yogyakarta. Media Presindo.Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasandan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Jakarta: CAPS

Wibisono, Y. 2007.*Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate SocialResponsibility)*. Fascho Publishing : Gresik.

Wicaksono, MA. 2010. *AnalisisTingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung JawabSosial Perusahaan (Studi Kasus: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy PlantPondok Ungu)*Skripsi.Tidak Diterbitkan. Program Studi Sains Komunikasi danPengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor :Bogor.

B. Perundang-Undangan

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

C. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Mamuju Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju_Utara) (Diakses pada tanggal 10 04 April 2017)

<http://www.infosawit.com/news/509/program-csr-sawit-diharapkan-meningkatkan-sektor-pendidikan> (Diakses pada tanggal 05 april 2017)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015

Lampiran 3. Dokumentasi Program CSR

Lampiran 4. Dokumentasi penelitian

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ch. Abdul Malik Pattana Endeng (Komp. Gubernur Sulawesi Barat) Telp/Fax (0426)2325170 Mamuju 91512
Website : www.Kesbangpol.sulbarprov.web.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 04 /BKBP

1. Dasar :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 79
2. Menimbang :
 1. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor : 440.02/4280/Polpum, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 8915/UN4.8.1/PL.02/2016 Tanggal 14 Desember 2016 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama/Objek : **Ike Dwiyantri**
- b. Jabatan/Tempat : Penelitian Utama/ Desa'Baras Kec. Baras Kab. Matra / NIM : E12113515
- c. Untuk :
 - 1) Melakukan Penelitian dengan proposal berjudul "**Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Unggul Widya Teknololgi Lestari Kabupaten Mamuju Utara**"
 - 2) Lokasi Penelitian : Kantor PT. Unggul Widya Teknololgi Lestari Kab. Matra;
 - 3) Waktu/Lama Penelitian : 03 Januari 2017 s.d 03 Maret 2017;
 - 4) Anggota Tim Peneliti : -
 - 5) Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 - 6) Status Penelitian : Baru.
- d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Cq Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, paling lambat 6 (Enam) Bulan setelah selesai penelitian.

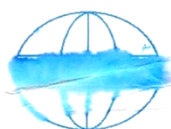
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 09 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
3. Bupati Mamuju Cq. Badan KesbangPol Kab. Mamuju Utara di Matra;
4. PT. Unggul Widya Teknololgi Lestari Kab. Matra di Matra;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar;
6. Saudara (i). **Ike Dwiyantri**.



WIDYA CORPORATION
PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI

Kompleks Harmoni Plaza E. No. 15
Jln. Suryo Pranoto No. 2 Jakarta 10130
INDONESIA
Telp : 021 – 6332058 (Hunting)
Fax : 021 – 6332088
Email : uwtl@indo.net.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 001/BRS-GM/II/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munir Mekka
Jabatan : General Manager

Menyatakan bahwa mahasiswa sbb :

Nama Mahasiswa : Ike Dwiyanti
Fakultas/Univ : FISIP/ Universitas Hasanuddin
Pada Tahun : 2017
Alamat : Baras 1

Adalah benar telah melakukan penelitian tentang “ **Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara** “ di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
Terima kasih.

Baras, 11 Februari 2017
PT. Unggul Widya Teknologi Lestari


Munir Mekka
General Manager



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara,
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat CSR adalah kumpulan program dan kegiatan sosial serta pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan bidang kerja yang telah ditetapkan.
6. Perusahaan adalah semua perseroan yang bekerja dalam lingkup wilayah Kabupaten Mamuju Utara
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdiam di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
8. PMA adalah Penanaman Modal Asing yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara.
9. PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara.
10. Bidang Kerja CSR adalah sektor kerja yang menjadi sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
11. Tim Pengawas CSR adalah susunan kepanitian yang dibentuk oleh Bupati Mamuju Utara yang terdiri dari beberapa unsur yang bertugas mengawasi dan memonitor pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang berdiam di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah tentang CSR ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penghargaan, dan penegakan hukum CSR di Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program CSR di Kabupaten Mamuju Utara; dan
- b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan CSR di Kabupaten Mamuju Utara

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum program CSR adalah memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program CSR dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras antara perusahaan dengan masyarakat, lingkungan dan kebudayaan di daerah.

Pasal 5

Tujuan khusus program CSR meliputi :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan CSR dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV ASAS

Pasal 7

Penyelenggaraan program CSR diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;

- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan CSR, perusahaan berhak:

- a. Menyusun program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program CSR dari perusahaan yang bersangkutan berdasarkan usulan dari masyarakat serta hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan CSR.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan CSR, perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan

- d. Menerima usulan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok terkait pelaksanaan program CSR.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pelaksana CSR

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Mamuju Utara baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyusun dan melaksanakan program CSR.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
- (4) Perusahaan pelaksana CSR tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB VI
PROGRAM DAN BIDANG KERJA CSR

Bagian Kesatu
Program CSR

Pasal 10

- (1) Program CSR dapat berbentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, kegiatan penyuluhan/pelatihan, dana, barang, jasa atau hal lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan atau telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Tim Pengawas CSR.

Bagian Kedua
Bidang Kerja CSR

Pasal 11

- (1) Bidang Kerja CSR antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah raga dan seni budaya;

- e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian lingkungan hidup ;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Penanggulangan Bencana ;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - j. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Tim Pengawas CSR.

Pasal 12

Bidang kerja CSR dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, pelatihan dan fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat

Pasal 13

Bidang kerja CSR dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan dan penyuluhan kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau jasa guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja CSR dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja CSR dalam Olahraga dan Seni budaya dapat berbentuk pelaksanaan kegiatan serta fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan seni budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 16

Bidang kerja CSR dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan sosial atau fasilitas sosial keagamaan, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja CSR dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat

dari terjadinya kerusakan.

Pasal 18

Bidang kerja CSR dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 19

Bidang Kerja CSR dalam bidang penanggulangan bencana dapat berbentuk pemberian bantuan dana, barang atau fasilitas yang digunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 20

Bidang kerja CSR dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dana, barang atau jasa guna memberdayakan dan membina pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 21

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR

Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Program CSR

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Program CSR yang dilakukan harus sepengetahuan Pemerintah Daerah dan Tim Pengawas CSR.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program CSR meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan CSR atas usulan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah ;
 - b. Menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan CSR kepada Bupati dan Tim Pengawas CSR.
 - c. Meminta persetujuan pelaksanaan program CSR kepada Bupati atas pertimbangan Tim Pengawas CSR yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara serta menghindari

terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

- d. Pelaksanaan program CSR oleh Perusahaan;
 - e. Monitoring dan evaluasi program CSR yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas CSR didampingi Pihak Perusahaan; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program CSR kepada Bupati.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah bersama Tim Pengawas CSR sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua Cara Penerapan CSR

Pasal 23

Peyelenggaraan program CSR dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengawas CSR.

Bagian Ketiga Lokasi Pelaksanaan CSR

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini meliputi seluruh wilayah yuridiksi Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan CSR meliputi :

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program CSR bersumber dari Anggaran Perusahaan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajiban.
- (2) Pembiayaan atau dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 % dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

BAB IX TIM PENGAWAS CSR

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan CSR maka dibentuk Tim Pengawas CSR.

- (2) Tim Pengawas CSR bertugas membantu Bupati dalam mengontrol pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Tim Pengawas CSR terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Susunan Tim Pengawas CSR serta rincian tugas dan teknis pelaksanaan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Mamuju Utara.
- (5) Pembiayaan kegiatan operasional dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawas CSR dibebankan pada APBD Kabupaten Mamuju Utara

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan CSR sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Tim Pengawas CSR.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut .
- (3) Laporan pelaksanaan CSR bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Tata cara Pelaporan pelaksanaan CSR akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Mamuju Utara .

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan CSR melalui Tim Pengawas CSR.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program CSR baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan CSR, dan harus berkoordinasi dengan Tim Pengawas CSR .

BAB XI

PENGHARGAAN CSR

Pasal 29

- (1) Perusahaan berhak diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam melaksanakan program dan kegiatan CSR.
- (2) Penilaian prestasi pelaksanaan Program dan Kegiatan CSR berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Tim Pengawas CSR .

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha ;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ;
 - e. Bentuk-bentuk sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah daerah, diwajibkan melakukan CSR paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan dasar Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan program CSR sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI
SULAWESI BARAT : (20) / (2015)

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people, planet*) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya ditulis CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak

memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah.

Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan CSR.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan CSR mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan CSR.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan CSR untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan CSR dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan CSR dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Huruf j.

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan CSR harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
2015 NOMOR

Lampiran 3 Dokumentasi Program CSR

DOKUMENTASI PROGRAM CSR



Bantuan Buku SDN Kapohu



Bantuan Pembangunan Sekolah



Bantuan Pembuatan Jalan Desa



Pemberdayaan Masyarakat sekolah 3R



Pemberdayaan Masyarakat sekolah 3R



Bantuan Sunatan Massal



Tanaman Konservasi Bakau



**Bantuan Ambulance Nusa Klinik Indah
Desa Motu**



Nusa Klinik Indah Desa Motu



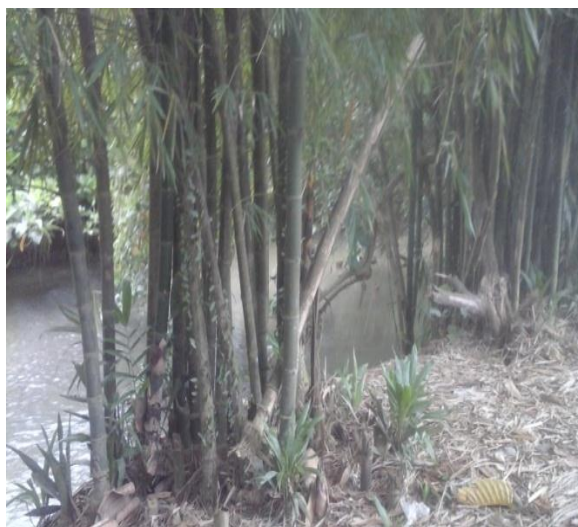
**Bantuan Posyandu Di Dusun
Kapohu Desa Kasano**



Bantuan Pendidikan Desa Motu



Bantuan Pendidikan Dusun Kapohu



Penanaman Bambu sungai Sempadan



Taman belajar Vovasanggaya

Lampiran 4 Dokumentasi bersama Informan



Wakil Bupati Mamuju Utara



Camat Abd Rakhman U Kecamatan Baras



Kepala Desa Balanti Bapak M. Naim



Kepala Desa Motu Bapak Octovianus



Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun bpk Miswar



Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun Bpk Dg. kelli



Masyarakat Ibu Hj Wati



Tenaga Kerja PTUWTL



Masyarakat Penerima CSR



Staff GM PT. Unggul Widya Teknologi Lestari